

**EVALUASI PROGRAM PELATIHAN BERBASIS
KOMPETENSI (PPBK) TAHUN ANGGARAN 2017 DI BALAI
LATIHAN KERJA MARITIM (BLKM) KOTA SABANG**

TESIS

OLEH :

**ROMY HIDAYAT
NPM. 161801108**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADIMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**EVALUASI PROGRAM PELATIHAN BERBASIS
KOMPETENSI (PPBK) TAHUN ANGGARAN 2017 DI BALAI
LATIHAN KERJA MARITIM (BLKM) KOTA SABANG**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik dalam Program Studi Magister Administrasi Publik pada Program
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**ROMY HIDAYAT
NPM. 161801108**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADIMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Evaluasi Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK)
Tahun Anggaran 2017 Di Balai Latihan Kerja Maritim
(BLKM) Kota Sabang

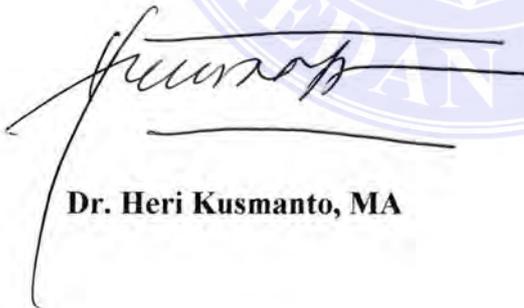
Nama : Romy Hidayat

NIM : 161801108

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



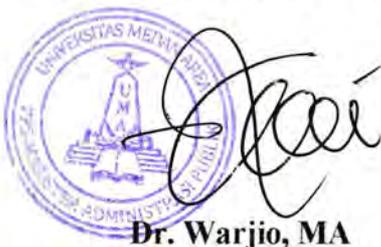
Dr. Heri Kusmanto, MA



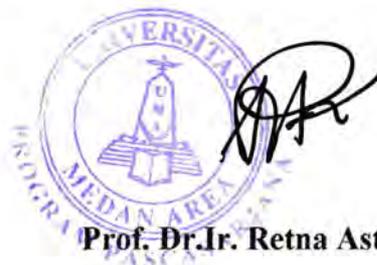
Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur



Dr. Warjio, MA



Prof. Dr.Ir. Retna Astuti K, MS

Telah diuji pada Tanggal 5 Juni 2018

Nama : Romy Hidayat

N P M : 161801108



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Isnaini, SH, MHum
Sekretaris : Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc
Penguji I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Penguji II : Drs. Kariono, MA
Penguji Tamu : Prof. Dr. H. M. Arif Nasution

PERNYATAAN

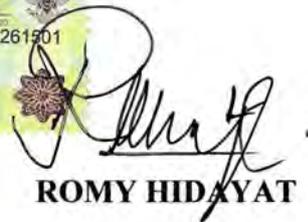
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Romy Hidayat
N P M : 161801108

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2018




ROMY HIDAYAT

ABSTRAKSI

EVALUASI PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (PPBK) TAHUN ANGGARAN 2017 DI BALAI LATIHAN KERJA MARITIM(BLKM) KOTA SABANG

Nama : Romy Hidayat
NIM : 161801108
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Salah satu upaya pemerintah dalam program peningkatan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja (PSDM/PKK) adalah melalui pendekatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat. Sebagai wujud komitmen terhadap upaya penanggulangan pengangguran di tingkat pusat dan daerah, maka kementerian Tenaga Kerja meluncurkan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK). Program ini merupakan program peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran PPBK tersebut berasal dari anggaran Kementerian Tenaga Kerja yang dimaksudkan untuk menanggulangi keterbatasan masyarakat terhadap akses pelatihan. Dan harapannya adalah setelah selesai melaksanakan pelatihan bisa bekerja secara mandiri atau bekerja di sektor-sektor industri yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi pengelolaan PPBK di Balai Latihan Kerja Maritim (BLKM) Kota Sabang pada tahun anggaran 2017. Sampel penelitian ini adalah sampel keseluruhan dari siswa pelatihan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PPBK dari unsur 5(lima) kelompok kejuruan sebanyak 80 orang sebagai representasi kegiatan terkait dengan mengambil seluruh populasi sebagai objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif guna mengetahui implementasi kegiatan PPBK di BLKM Kota Sabang tahun anggaran 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari keenam indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas dan ketepatan menunjukkan skor rata-rata dalam kondisi cukup atau sedang (70,65). Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator menunjukkan bahwa ada satu indikator yaitu kecukupan yang termasuk kategori kurang, tidak ada indikator menunjukkan kategori baik dan kelima indikator lainnya termasuk dalam kategori cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPBK di BLKM Kota Sabang pada tahun anggaran 2017 termasuk dalam kategori cukup atau sedang dan dasar kebijakan PPBK dapat diimplementasikan.

Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan PPBK, Pelatihan Tenaga Kerja

ABSTRACT

EVALUATION OF COMPETENCY-BASED TRAINING PROGRAM FOR FISCAL YEAR 2017 IN MARITIME WORKPLACE TRAINING CENTER OF SABANG CITY

Name : Romy Hidayat
NIM : 161801108
Program : Master of Public Administration
Preceptor I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Preceptor II : Drs. Kariono, MA

One of the governments efforts in improving human resources and expanding employment opportunities is through a competency-based and community based training approach. As a manifestation of commitment to the effort to overcome unemployment at the central and regional levels, Then the ministry of manpower launched a competency-based program. This program is a program to increase the competence of Indonesian workers as an effort to improve the welfare of the community. The program budget is derived from the ministry of manpower budget intended to address the limitation of the community to access training and hope is that after completion of the training can work independently or work in existing industrial sectors.

This study aims to determine to determine the realization of the management of competency-based training programs in maritime workplace trining center sabang city budget year 2017. This sample of this study is the overall sample of the training students who were directly involved in the implementation of a competency-based training program from five vocational groups of 80 persons as a representation of activities related to taking the entire population as the object of research.data analysis is done by using descriptive method in order to know the implementation of competency-based training activities at sabang city work practice center of budget year 2017.

The results showed that on the whole of the six indicators used to measure the implementation of the program, namely the effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy showed an average score under conditions sufficient or moderate (70,65). But when viewed from each indicator that the adequacy of the category included less, no indicator indicates the good category and the other five indicator included in the category enough. It can be concluded that the implementation of a competency-based training program at sabang city's maritime training center in fiscal year 2017 included in moderate category and the basis of competency-based training policy can be implemented.

Keywords: Evaluation, Management of competency-based training programs, Labor Training.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Romy Hidayat
2. Tempat/Tanggal lahir : Kutacane/ 19 Agustus 1977
3. Alamat : Jl. Ahmad Yani, Link. II Nawawi, Tapak Gajah
Kota Atas, Sabang
4. Telepon : 081370951290
5. Agama : Islam
6. Jenis kelamin : Laki-laki
7. Status : Menikah
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Pendidikan :
 - a. Lulus SD Negeri 1 Kutacane Tahun 1989 bersertifikat
 - b. Lulus SMP Negeri 1 Kutacane Tahun 1992 bersertifikat
 - c. Lulus SMA Negeri 4 Medan Tahun 1995 bersertifikat
 - d. Lulus Sarjana (S1) Teknik Perkapalan Universitas Darma Persada Jakarta Tahun 2001 bersertifikat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul tesis ini adalah “Evaluasi Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun Anggaran 2017 di Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu segala saran dan kritik dari pembaca guna menyempurnakan tesis ini sangat penulis harapkan sehingga tesis ini semakin sempurna untuk dijadikan suatu informasi pengetahuan.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membimbing penulisan ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

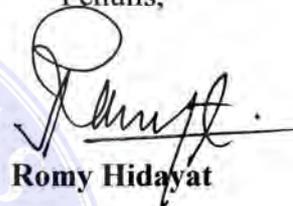
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. H. M. Arif Nasution yang telah menularkan Ilmu dan semangatnya kepada penulis.

4. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr. Isnaini, SH, MHum, selaku Wakil Direktur Bidang Akademik yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
7. Bapak Drs. Kariono, MA, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc selaku dosen yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
10. Bapak Muslim, ST selaku Kepala BLK Maritim Kota Sabang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
11. Bapak dan Ibu responden penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu dan berkontribusi dalam memberikan data dan informasi dalam proses penelitian ini.
12. Ibunda Alm. Nursyam, Ayahnda Muchtar Adjis, Ibu Emmy Amiroel Agoes, Ayah Amiroel Fachry Agoes, Istri dan anak-anak, Marlina, Ira, Karissa Agoes, Racky serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dorongan

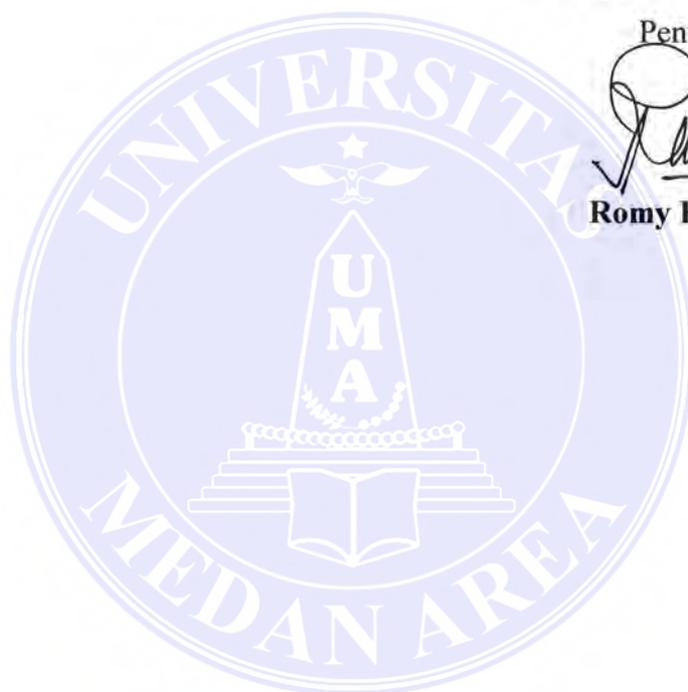
dan semangat serta Do'a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis. Dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang ikut memberi saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini, semoga budi baik mereka menjadi amal sholeh di hadapan Allah SWT dan berkontribusi dalam perbaikan kualitas bangsa ini, Aamiin.

Medan, Juni 2018

Penulis,



Romy Hidayat



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Kebijakan Publik	10
2.1.1. Pengertian Kebijakan. Publik	10
2.1.2. Proses Kebijakan Publik	10
2.1.3. Evaluasi Kebijakan Publik	12
2.1.3.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan	12
2.1.3.2. Tujuan Evaluasi Kebijakan	17
2.1.3.3. Fungsi Evaluasi Kebijakan	18
2.1.3.4. Kriteria Evaluasi Kebijakan	22

2.1.3.5. Pendekatan Evaluasi Kebijakan	25
2.1. Kajian Literatur.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Bentuk Penelitian	29
3.2. Lokasi Penelitian	31
3.3. Populasi dan Sampel	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data	33
3.5. Operasionalisasi Variabel	34
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
3.6.1. Teknik Pengolahan Data	36
3.6.2 Teknik Analisis Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Profil Kota Sabang	39
4.1.1. Aspek Geografi.....	39
4.1.2. Aspek Demografi	42
4.1.3 Aspek Kesejahteraan.....	42
4.2. Profil Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang.....	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
5.1. Hasil Penelitian	60
5.1.1. Karakteristik Responden	60
5.1.2. Profil Pemahaman Responden Terhadap PPBK.....	63
5.1.3. Variabel Penelitian	64
5.2. Analisis dan Interpretasi Data	96

5.2.1. Efektivitas	97
5.2.2. Efisiensi	98
5.2.3. Kecukupan	99
5.2.4. Kesamaan (Keadilan)	99
5.2.5. Responsivitas	101
5.2.6. Ketepatan	102

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	105
6.2. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	112
-----------------------------	-----

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kualitas Sumber Daya Manusia adalah salah satu prasyarat yang harus dimiliki agar kita dapat bersaing dalam dunia kerja. Pembukaan Zona Ekonomi Asean dan Asia yang tidak lama lagi mendorong kita untuk terus memacu peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya dengan berbagai program agar kualitas kompetensi tenaga kerja dapat terus ditingkatkan salah satunya melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja salah satunya adalah Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK). Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) adalah merupakan program pelatihan yang memungkinkan setiap peserta mengikuti pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang ingin diikutinya. Kurikulum pelatihan ini mengacu kepada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Pelatihan jenis ini biasanya bersumber anggaran dari APBN baik melalui dana Tugas Pembantuan atau Dekosenterasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pelatihan berbasis kompetensi ditopang oleh tiga pilar utama, pertama, untuk membangun SDM unggul berbasis kompetensi diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kedua, Pelatihan Berbasis Kompetensi yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang

mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan di tempat kerja. Sedangkan pilar ketiga adalah sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi, dan dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas.

Balai Latihan Kerja atau disingkat BLK merupakan salah satu lembaga pelatihan yang direncanakan dan dibentuk oleh pemerintah untuk membantu mengatasi beberapa masalah terkait dengan ketenagakerjaan dan pengangguran serta masalah lapangan kerja. Dalam hal ini BLK bertindak sebagai motivator dan penggerak dalam upaya menciptakan dan membentuk tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan profesi dan keahliannya.

Balai Latihan Kerja atau sering disebut dengan singkatan BLK adalah sarana dan prasarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian di bidangnya masing-masing.

Secara umum keberadaan BLK adalah membuka beberapa bidang kejuruan seperti kejuruan Teknik Sepeda Motor, Kejuruan Teknisi Komputer, Kejuruan Operator Komputer, Kejuruan Tata Busana, Kejuruan Teknik Pendingin, Kejuruan Tata Graha, Kejuruan Tata Boga dan lain sebagainya. Bahkan keberadaan BLK juga memfasilitasi untuk keahlian dalam bidang bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang dan bahasa Korea.

Tujuan dari BLK adalah Meningkatkan produktivitas Tenaga Kerja baik di daerah pedesaan dan pinggiran kota, Memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja, Menciptakan pelatihan produksi serta uji keterampilan, Mendorong dan

mengembangkan jiwa kewirausahaan dan Meningkatkan motivasi dan jiwa mandiri.

Asal muasal atau sejarah dari BLK berawal dari ide awal pembentukan Pusat Latihan Kerja Program Pelatihan (PPKPI) bidang industri pada tahun 1953 dan pada tahun 1960, PPKPI diarahkan menjadi pelatihan pencari kerja pegawai, Instansi agar menjadi Tenaga Kerja yang memiliki keterampilan.

Pada tahun 1970, seiring dengan perkembangan jaman, terjadi perubahan dari Pusat Latihan Kerja Program Pelatihan (PPKPI) menjadi Balai Latihan Kerja di bawah pembinaan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan sejak otonomi daerah Balai Latihan Kerja (BLK) berubah menjadi Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) berada dibawah naungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja di masing-masing daerah di Indonesia.

BLK lahir pertama kali di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1947. Pada mulanya BLK-BLK didirikan hanya di Pulau Jawa. Pendirian BLK diluar pulau Jawa baru dimulai pada tahun 1957 dengan dibangunnya BLK di Padang, Sumatera Barat. Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat atas peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, jumlah BLK meningkat secara pesat dan kini telah berjumlah 182 BLK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut sejarahnya, perkembangan BLK di Indonsia di bagi menjadi 7 periode yaitu :

1. Periode I (1945-1960)

Bermula dari Jawa, BLK pertama di bangun di Solo pada tahun 1947. Pada awal periode ini, sebanyak 10 BLK seluruhnya di bangun di Pulau Jawa, dan baru pada tahun 1957 pembangunan BLK diluar Pulau Jawa di mulai dengan di bangunnya BLK Padang, Sumatera Barat yang dilanjutkan dengan didirikannya 4 BLK lainnya termasuk di Jayapura, Manokwari dan Palembang. Program pelatihan di BLK dalam periode ini lebih di fokuskan pada keterampilan Industri seperti Konstruksi, elektronika dan listrik.

2. Periode II (1960an) Ekspansi BLK ke luar pulau Jawa

Perkembangan BLK selama periode ini ditandai dengan meningkatnya jumlah BLK yang di bangun diluar Pulau Jawa. Pada periode ini mulai di kembangkan unit-unit pelatihan keliling (Mobile Training Unit/MTU) untuk mencapai kelompok sasaran yang berada di daerah pedesaan.

3. Periode III (1970an) Awal pertumbuhan BLK

Pada periode ini di bangun 21 BLK di seluruh wilayah Indonesia

4. Periode IV (1980an) Puncak pertumbuhan BLK

Pada periode ini BLK memasuki tahap perkembangan puncak dengan di bangunnya 16 BLK tipe B dan 104 tipe C (BLK kecil), sehingga pada Repelita IV di tahun 1988 secara keseluruhan terdapat 157 buah BLK.

Program pelatihan di BLK dalam periode ini dititik beratkan pada pelatihan untuk para penganggur dan dilaksanakan berdasarkan Trilogi pelatihan yaitu : Pelatihan harus berdasarkan permintaan, Pelatihan harus sesuai dengan perkembangan teknologi, Pelatihan harus di satupadukan

dalam proses yang bersangkutan paut (hubungan pelatihan, pendidikan dan pengembangan) dan pelaksanaan proses koordinasi antar instansi yang berpartisipasi.

5. Periode V (1990-1997) BLK menuju kemandirian

Pada periode ini diadakan reformasi pengelolaan BLK yang diarahkan untuk menata ulang seluruh sistem pengelolaan BLK agar bisa mandiri baik dari segi manajemen maupun finansial. Program pelatihan disusun sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada permintaan.

6. Periode VI (1998-2006) Sewindu BLK dalam transisi

Dengan diterapkannya otonomi daerah di tahun 2001, sebagai implikasinya diterapkan pula desentralisasi manajemen BLK. Hal ini mengakibatkan sebagian besar BLK diserahkan kepada pemerintah daerah. Pada periode ini sebanyak 154 BLK diserahkan kepada Pemda dan hanya 11 BLK yang masih dikelola langsung Pemerintah Pusat.

7. Periode VII (2007-2011) Revitalisasi BLK dan program 3 in 1

Pada periode ini dicanangkan kebijakan revitalisasi BLK dan program 3 in 1 yang mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi dan penempatan. Revitalisasi BLK dilaksanakan dalam rangka mengembalikan fungsi BLK menjadi lembaga pelatihan yang menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Revitalisasi tersebut menyangkut aspek manajemen, sarana dan prasarana, sumber daya manusia/instruktur dan program pelatihan yang diakhiri dengan sertifikasi dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan BLK.

Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim Kota Sabang merupakan salah satu Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah yang dibentuk guna mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan tenaga kerja yang terampil dan memiliki kompetensi sesuai profesi dan keahliannya.

UPTD BLK Maritim Kota Sabang pertama sekali didirikan tahun 2003 dengan sasaran sebagai Balai Latihan Kerja Kemaritiman di Wilayah Barat Indonesia. Pada saat awal berdiri UPTD BLK Maritim Kota Sabang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan pelatihan harus bekerjasama dengan pihak lain. Disamping kondisi daerah yang dilanda konflik juga berpengaruh pada perkembangan BLK.

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang terjadi di Aceh termasuk Kota Sabang yang membutuhkan banyak tenaga terampil dan siap pakai, kondisi ini kembali membangun kesempatan kepada BLK untuk terus berkiprah. Pada Tahun 2005 mulailah direkrut tenaga instruktur yang nantinya akan menjadi pilar UPTD BLK Maritim Kota Sabang.

Tahun 2006 mulai dikirim 3 orang calon instruktur untuk mengikuti Diklat Dasar Instruktur Teknologi Mekanik yang berlokasi di BBKLDN Bandung. Sejak itu pengiriman instruktur untuk mengikuti Dikdas menjadi rutin setiap tahun. Pada tahun yang sama pembangunan fisik sarana dan prasarana UPTD BLK Maritim Kota Sabang juga mulai dilaksanakan.

Tahun 2009, keberadaan UPTD BLK Maritim Kota Sabang secara resmi dibentuk struktur organisasinya sesuai dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor

12 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Sabang. Pada tahun 2009 juga dilantik Kepala UPTD BLK Maritim Kota Sabang yang pertama yaitu Bapak Drs. Muktar Daud. Pertengahan Tahun 2011, pimpinan UPTD BLK Maritim Kota Sabang berganti kepada Bapak Muslim, ST selaku Kepala UPTD BLK

Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) di Balai Latihan Kerja Maritim (BLKM) yang diharapkan dapat meningkatkan penanggulangan pengangguran dan pelatihan tenaga kerja di Kota Sabang. Namun keberadaan PPBK di Sabang selama ini belum memberikan kontribusi sosial dan peningkatan kompetensi di masyarakat. Minimnya kegiatan pelatihan yang diakibatkan rendahnya jumlah kejuruan yang ada, selain itu sektor industri dan perdagangan yang ada di Kota Sabang masih berskala industri rumahan. Kondisi ini yang menyebabkan hasil pelatihan tidak begitu maksimal akibat masih kecilnya volume pelatihan dan hanya bertumpu pada kegiatan rutinitas setiap tahunnya. Kurang baiknya kinerja pelatihan ini lebih disebabkan lambatnya realisasi pengembangan pelatihan yang dilatarbelakangi oleh berbagai hal hingga dukungan kebijakan.

Patton dan Savicky (1986) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sama penting dengan kebijakan itu sendiri sehingga kegagalan implementasi dianggap sama dengan kegagalan kebijakan. Berkenaan dengan *policy failures* dalam konteks pengawasan dan evaluasi kebijakan. Kegagalan kebijakan dikelompokkan menjadi 2, yaitu (1) *program failures* di mana kebijakan tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan disain, dan (2) *theory failures* di mana

kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan desain tetapi tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Dalam perjalanannya Evaluasi Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) di Balai Latihan Kerja Maritim (BLKM) di Kota Sabang, PPBK di kota Sabang mengalami banyak hambatan baik pada tahapan implementasi kebijakan hingga pembangunan sarana dan prasarana pelatihan, hingga saat ini belum mampu memberikan hasil nyata dari PPBK di Kota Sabang. Oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai: “ **Evaluasi Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) Tahun Anggaran 2017 di Balai Latihan Kerja Maritim (BLKM) Kota Sabang** ”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) di Balai latihan Kerja Maritim(BLKM) Kota Sabang telah dilaksanakan dengan efektif, efisien, kecukupan, kesamaan (keadilan), responsivitas dan ketepatan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan (keadilan), responsivitas dan ketepatan pelaksanaan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) di Balai Latihan Kerja Maritim (BLKM) Kota Sabang.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah khususnya mengenai evaluasi program;
2. Secara teoritis, akan diperoleh informasi empirik berdasarkan pijakan teori yang mendukung terhadap evaluasi program PPBK Tahun Anggaran 2017 di Kota Sabang;
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dari kajian kriteria – kriteria evaluasi yang dijadikan sebagai indikator dalam menentukan keberhasilan PPBK Tahun Anggaran 2017 di Kota Sabang sebagai upaya perbaikan ke depan;
4. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya untuk melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan pijakan teori yang telah dibuktikan secara ilmiah melalui prosedur penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Riant Nugroho (2008:55) merumuskan defenisi kebijakan publik secara sederhana bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Dalam Budi Winarno (2007:30-31) kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik.

2.1.2. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap

ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus bahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama;

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik;

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan;

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit

administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana;

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yang memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini penulis membatasi dan hanya akan membahas tentang evaluasi kebijakan publik.

2.1.3. Evaluasi Kebijakan Publik

2.1.3.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian; hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Sedangkan stufflebeam dalam Arikunto (2006 : 1) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi

kebijakan lebih berkenan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;
2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekwensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda

dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex-post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (*ex-ante*);

4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan

meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Menurut Abidin (2006:211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*);
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring;
3. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*).

Abidin (2006:213) lebih lanjut mengemukakan bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (*values*) yang antara lain berkenaan dengan :

1. Efisiensi (*Efficiency*), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya, atau (hasil/biaya);
2. Keuntungan (*profitability*), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil/biaya);
3. Efektif (*effectiveness*), yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya;
4. Keadilan (*equity*), yakni keseimbangan (*proporsional*) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan);
5. Detriments, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal;
6. Manfaat tambahan (*marginal rate of return*), yaitu tambahan hasil banding biaya atau pengorbanan (*change-in benefits/change –in-cost*).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu upaya untuk mengukur, menilai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam lingkup yang lebih umum atau keseluruhan dari tahapan kebijakan publik.

2.1.3.2. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Wibawa dkk (1994:9-10) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui 4 aspek yaitu :

1. Proses pembuatan kebijakan;
2. Proses implementasi;
3. Konsekuensi kebijakan;
4. Efektivitas dampak kebijakan.

Evaluasi terhadap aspek kedua disebut evaluasi implementasi sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Riant Nugroho, dalam premisnya mengemukakan bahwa setiap kebijakan harus dievaluasi sebelum diganti sehingga ada klausula “ dapat diganti setelah dilakukan evaluasi “ dalam setiap kebijakan publik. Hal ini perlu dijadikan acuan karena, pertama, untuk menghindari kebiasaan buruk administrasi publik di Indonesia yang sering menerapkan prinsip ganti pejabat, harus ganti peraturan. Kedua, supaya setiap kebijakan tidak diganti hanya karena keinginan atau selera pejabat yang saat itu berwenang (Nugroho, 2008:471). Terkait dengan hal tersebut tujuan evaluasi menurut Nugroho (2008:472) adalah bukan untuk menyalahkan pihak yang mengeluarkan kebijakan, namun untuk mengetahui kesenjangan antara

harapan dan pencapaian suatu kebijakan serta bagaimana menutup kesenjangan tersebut.

Menurut pendapat Marielle Berriet - Sollic, Pierre Labarthe, Catherine Laurent and Jacques Baudry dalam Makalah yang dipersiapkan untuk “Seminar 122 European Association of Agricultural Economist (EAAE) “ di Ancona, 17-18 Februari 2011 yang berjudul *Empirical validity of the evaluation of public policies: models of evaluation and quality of evidence*, mengatakan bahwa :

When an evaluation procedure is used to assess a public action programme, generally the goal is to produce the best iknowledge possible on the actual impact of the programme. The best knowledge should be a) based on relevant empirical evidence (which addresses the question at hand); b) corroborated by facts (facts which reflect real world observation and are empirical in nature) and c) reliable (knowledge produced using rigorous methods).

Pernyataan di atas memberikan pengertian bahwa ketika prosedur evaluasi digunakan untuk menilai pelaksanaan program kebijakan publik , umumnya tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan terbaik tentang dampak program yang sebenarnya. Pengetahuan "terbaik" seperti dimaksud di atas harusnya didasarkan pada bukti empiris yang relevan, diperkuat oleh fakta (fakta yang mencerminkan observasi dunia nyata dan empiris di alam) dan terpercaya dalam artian pengetahuan yang dihasilkan menggunakan metode yang ketat.

2.1.3.3. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Fungsi Evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho (2011:463) memiliki empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola

hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. (1) Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan; (2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan; (3) Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan; (4) Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Selain hal tersebut diatas, fungsi dari evaluasi kebijakan publik menurut Putra (2003:93) ada tiga hal pokok, yaitu : (1) memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan; (2) untuk menilai kepasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi; dan (3) untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama segi metodologinya. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan dilakukan agar proses kebijakan secara keseluruhan dapat berlangsung secara baik.

Fungsi evaluasi menurut Agustino (2006:188-189) ada tiga macam yaitu :

1. Memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kebijakan;
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat

positif akan diperoleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Dunn (2003:609-611) evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yakni :

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik;
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif);
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada defenisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Menurut Samodra Wibawa (1994), evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi yaitu :

1. **Ekplanasi.** Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan;
2. **Kepatuhan.** Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan;
3. **Audit.** Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan;
4. **Akunting.** Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Sedangkan fungsi evaluasi menurut Agustino (2006:188-189) adalah :

1. Memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kebijakan;
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu : "Pertama, dan yang paling

penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609 dan 610).

2.1.3.4. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Kriteria-kriteria yang dirumuskan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;

3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Chris. I. Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Department of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State – Nigeria dalam “British Journal of

Humaniora dan Social Science” (April 2012, Vol. 5 (1) dengan judul **Public Policy and the Challenges of Policy Evaluation in Third World**, yang mengatakan bahwa :

Evaluation of public programmes leads to questions by the policy makers not only on whether the policy has succeeded in achieving the goal for which it was initiated and formulated or designed, but also assist in finding out from the target group how they perceive the programme or policy as well as various prognosis/strategies necessary to make the programme move viable.

Pernyataan diatas menyatakan bahwa evaluasi program publik mengarah pada pertanyaan kepada para pembuat kebijakan yang tidak hanya pada keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang dirumuskan atau dirancang, tetapi juga membantu dalam mencari informasi dari kelompok sasaran bagaimana mereka memandang program atau kebijakan serta berbagai strategi yang diperlukan untuk membuat program yang lebih layak.

Seanjutnya masih dalam Chris. I. Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Department of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State – Nigeria dalam “British Journal of Humaniora dan Social Science” (April 2012, Vol. 5 (1) dengan judul **Public Policy and the Challenges of Policy Evaluation in Third World**, menyatakan bahwa :

In evaluating public programmes and policies, it is therefore, advisable that evaluators must adopt or use certain relevant indicators in such exercise. Thus, indicators are indication of a given situation (WHO, 1981:8). Therefore, the use of indicators will guide the investigator or policy maker to ascertain what should be measured, the criteria for such measurement and comparison of the phenomenon with other existing public programmes already implemented.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa dalam mengevaluasi program dan kebijakan publik, disarankan agar "evaluator" diharuskan mengadopsi atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menggunakan indikator tertentu yang relevan dalam pelaksanaannya. Indikator harus dapat memberikan indikasi dan refleksi dari situasi program yang dievaluasi (WHO, 1981: 8). Oleh karena itu, penggunaan indikator akan memandu peneliti atau pembuat kebijakan untuk memastikan apa yang harus diukur, kriteria untuk pengukuran tersebut dan perbandingan fenomena dengan program publik lainnya yang ada dan sudah dilaksanakan.

2.1.3.5. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik memiliki pendekatan yang beragam tergantung tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator yang akan melakukan evaluasi.

Menurut Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yaitu :

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;
3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan berakhir, yang diarahkan untuk melihat

pencapaian program dalam mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) atau manfaat (dampak terhadap kebutuhan) program.

Dunn (2003:613-620) membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga, yaitu :

1. Evaluasi Semu. Evaluasi semu (*pseudo Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial;
2. Evaluasi Formal. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal dan merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program;
3. Evaluasi Keputusan Teoritis. Evaluasi ini merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil kebijakan yang

secara eksplisit dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Asumsi evaluasi teoritis keputusan adalah tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*) dengan pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi yang bertujuan untuk menilai keberhasilan program dengan indikator sesuai kriteria-kriteria kebijakan publik yang dipaparkan oleh Dunn dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak ada pilihan model yang terbaik, yang ada adalah pilihan yang harus kita pilih secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan kebijakannya sendiri (Riant Nugroho, 2008:454);
2. Dalam penelitian ini fokus penelitian lebih tertuju pada kriteria-kriteria kebijakan publik yang dipergunakan sebagai indikator keberhasilan kebijakan yang lebih menekankan pada unsur-unsur pokok dalam sebuah evaluasi yakni efektivitas, Efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Sementara model yang paling detil membahas permasalahan ini adalah model William N Dunn.

2.2 Kajian Literatur

Mohammad Sulchan (2007) berjudul Manajemen Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Semarang, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat di sampaikan bahwa Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Semarang merupakan lembaga/institusi yang menyelenggarakan program

pelatihan bagi para penganggur/pencari kerja . Keberadaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Semarang sangat diperlukan dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap untuk memasuki pasar/dunia kerja maupun untuk usaha mandiri.

Rian Nazarudin (2018) berjudul Analisis Peran Pelatihan Kerja Oleh Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Potensi Angkatan Kerja di Bandar Lampung di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam , Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan, bahwa keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) berdampak positif dalam meningkatkan potensi angkatan kerja. Dapat dilihat dari lulusan Balai Latihan Kerja yang telah mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan dan mendirikan usaha mandiri demi terwujudnya pengurangan tingkat pengangguran di Kota Bandar Lampung. Dengan adanya pelatihan dari BLK maka lulusan BLK mampu mengembangkan prinsip bersaing dengan sehat dan benar. Prinsip persaingan yang sehat dan benar menurut islam, antara lain : memberikan yang terbaik kepada perusahaan atau tempat kerja, tidak berlaku curang, dan kerjasama positif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Metode penelitian dilakukan melalui analisis deskriptif, yaitu suatu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Analisis deskriptif ini dengan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki bagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang kuat (Nawawi Hadari, 2001:64). Sedangkan Surachmad (1990:141) mengemukakan bahwa analisis deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang akan terjadi;
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dipusatkan kemudian dianalisis.

Menurut Hadari Nawawi, (2001:64) : Bentuk-bentuk pokok metode deskriptif ada tiga, yaitu :

1. Survei (*survey studies*);
2. Studi hubungan (*interrelationship studies*);
3. Studi perkembangan (*developmental studies*).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka bentuk penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah bentuk survei (*survey studies*). Menurut Moh.

Mazir (1999:65), yang dimaksud dengan penelitian dalam bentuk survei adalah :

“Penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual”, dalam penelitian ini, yaitu dengan cara melakukan pengkajian, penggambaran maupun pengungkapan mengenai analisis tentang pelaksanaan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) Tahun Anggaran 2017 di Balai Latihan Kerja Maritim (BLKM) Kota Sabang.

Instrumen penelitian ini berupa survei, kuesioner yang diberikan kepada sekelompok sampel, serta wawancara mendalam. Bentuk kuesioner dirancang dengan model Likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial.

Pelaksanaan penelitian dengan desain penelitian deskriptif analisis adalah sebagai berikut :

1. Mula-mula peneliti berupaya melakukan interpretasi secara meluas dan mendalam terhadap kemungkinan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program Pelatihan Berbasis Kompetensi, kemudian di deskripsikan dan akan diuji melalui proses penelitian empirik;
2. Langkah berikutnya adalah kiat mengumpulkan data deskriptif dan menetapkan instrumen yang sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan atas variabel – variabel yang hendak diteliti, untuk menjangkau data dan informasi yang akurat. Keseluruhan dari proses hasil penelitian kemudian disajikan secara tertulis, namun dengan sifatnya yang induktif dan terbuka, dimungkinkan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan atas dasar data yang terbaru.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Sabang Provinsi Aceh dan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan April 2018.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kota Sabang dikarenakan memiliki jumlah pemuda/pemudi putus sekolah yang cukup signifikan dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Aceh.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, tumbuhan, gejala, nilai test, atau peristiwa sebagai sumber daya yang memiliki karakteristik dalam sebuah penelitian (Nawawi, 1991:141).

Sedangkan menurut Sugiyono (2006:117) menyebutkan bahwa "populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari obyek/subyek yang dapat dijadikan sebagai sumber data dalam suatu penelitian, dan mempunyai karakteristik tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dan mengetahui pelaksanaan PPBK di Kota Sabang.

Sampel adalah wakil dari populasi yang menjadi objek penelitian, atau sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 1998:57).

Teori sampel dan sampling penelitian menurut Arikunto (2010:134-185) bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25 % atau lebih. Oleh karena itu maka sampel yang akan di teliti merupakan sampel keseluruhan populasi dari setiap kelompok kejuruan yang masing-masing kelas kejuruan berjumlah 16 orang, dalam 5 kejuruan sehingga berjumlah 80 orang. Sampel ini sekaligus menjadi informan penelitian juga.

Tabel 3.1. Komponen Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah
1.	Kejuruan Sepeda Motor	16 Orang
2.	Kejuruan Las Listrik	16 Orang
3.	Kejuruan Perkayuan	16 Orang
4.	Kejuruan Operator Komputer	16 Orang
5.	Kejuruan Menjahit	16 Orang
	Total	80 Orang

Dari tabel 3.1 diatas dapat dirincikan bahwa dari masing-masing unsur adalah :

1. Kejuruan Sepeda Motor
2. Kejuruan Las Listrik
3. Kejuruan Perkayuan

1. Kejuruan Operator Komputer
2. Kejuruan Menjahit

Keputusan peneliti tetap pada keyakinan bahwa unit sampel yang diambil merupakan sampel keseluruhan.

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan cara :

- a. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang berisikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan sistem pelayanan terhadap responden dengan menyajikan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditentukan;
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan sumber informasi yang mengerti permasalahan yang diteliti terutama pada bidang yang menangani langsung pelaksanaan Program, yaitu :
 1. Kepala BLK Maritim Kota Sabang, Bapak Muslim, S.T
 2. Kasubag Tata Usaha BLK Maritim, Bapak Hendri Supriyeto, S.I.P
 3. Kepala Jurusan Kejuruan Menjahit, Ibu Asmaleni, S.Sn
- c. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang ada keterkaitannya dengan penelitian seperti : laporan, artikel, literatur, dan berbagai bahan – bahan publikasi lainnya.

Untuk memperinci data-data sekaligus menyajikan persentase dari masing-masing jawaban responden maka setiap pertanyaan akan diberikan empat alternatif jawaban secara tertutup. Kemudian dari empat alternatif jawaban yang disediakan akan diberikan skor sebagai berikut:

- Untuk jawaban alternatif (A) diberi skor 4;
- Untuk jawaban alternatif (B) diberi skor 3;
- Untuk jawaban alternatif (C) diberi skor 2;
- Untuk jawaban alternatif (D) diberi skor 1.

3.5. Operasionalisasi Variabel

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu evaluasi program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun Anggaran 2017 di Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang.

Evaluasi pelaksanaan program pelatihan Berbasis Kompetensi adalah tindakan-tindakan dalam upaya mengukur keberhasilan tujuan program dalam upaya pemberian Pelatihan kepada masyarakat di Kota Sabang.

Kriteria-kriteria yang diukur dalam evaluasi program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun Anggaran 2017 di Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang sesuai dengan William N Dunn (2003) adalah :

1. Efektivitas (*effectiveness*), meliputi : capaian hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas

yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;

2. Efisiensi (*efficiency*), meliputi : jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (*adequacy*), meliputi : tingkat efektivitas dalam memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (*equity*) meliputi : keeratan hubungan antara rasionalitas legal dengan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (*responsiveness*), meliputi : kebijakan yang dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (*appropriateness*) meliputi : kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan

tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dilakukan pula kajian pustaka tentang tata cara evaluasi program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun Anggaran 2017 di Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang, serta wawancara semi terstruktur untuk mendalami masalah-masalah yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.6.1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan yang berasal dari penelitian di lapangan khususnya penyebaran angket keusioner kepada responden, maka penulis memakai analisa deskriptif dengan menggunakan tabel tunggal atau tabel frekuensi dengan tujuan data lebih terperinci sekaligus menyajikan persentase dari masing-masing jawaban responden sehingga didapat data yang lebih dominan.

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penulisan ini dengan tahapan :

1. Klasifikasi data, dalam hal ini data yang diperoleh diklasifikasikan dalam kelompok data kualitatif;
2. Tabulasi data, data yang telah diklasifikasi dimasukkan ke dalam tabel;
3. Interpretasi data, dengan diberikan ulasan secara kualitatif.

Selanjutnya data yang diolah tersebut dimasukkan ke dalam skala Likert. Menurut Sugiyono (1998:74) bahwa: “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial”. Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif, dengan penilaian 4, 3, 2, dan 1.

Tabel 3.2. Skala Penilaian Untuk Pernyataan Positif dan Negatif

No	Keterangan	Skor Positif	Skor Negatif
1	Sangat Setuju	4	1
2	Setuju	3	2
3	Tidak Setuju	2	3
4	Sangat Tidak Setuju	1	4

(Sumber : Sugiyono, 2010:94)

3.6.2. Teknik Analisis Data

Untuk melaksanakan analisis data, dilakukan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan Arikunto (1996:205), sebagai berikut:

- a. Persiapan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 1. Melakukan pengecekan data, identitas dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk analisis;
 2. Melakukan pemeriksaan seluruh data yang tertuang dalam instrumen penelitian;
 3. Memeriksa tata cara pengisian data.
- b. Tabulasi data, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Menjumlahkan setiap rangking tanggapan ke dalam empat rangking tanggapan di setiap nomor angket;

2. Pengkodean pada nomor-nomor tertentu yang tidak dapat rangking tanggapan terutama yang telah salah atau keliru dalam memberikan tanggapan.
- c. Melakukan perubahan jenis data, yaitu dari data yang kuantitatif ke data kualitatif untuk diinterpretasikan secara kualitatif dengan melihat jumlah tanggapan yang telah disediakan pada angket.

Selanjutnya data-data dianalisis melalui analisis deskriptif dan selanjutnya menginterpretasikannya berdasarkan persentase dari alternatif jawaban yang telah dikemukakan responden. Rumus persentase yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\% = f / n \times 100$$

Keterangan :

% = Persentase tanggapan responden;

f = Frekuensi (jumlah responden) yang memberikan jawaban atas satu alternatif jawaban;

n = Jumlah seluruh anggota sampel yang diamati dan dimintai keterangan.

Hasil pengukuran dinilai berdasarkan pada pendapat Arikunto (1996:224) sebagai berikut :

Apabila hasil persentase mencapai:

- a. 76% - 100% = digolongkan baik;
- b. 56% - 75% = digolongkan cukup atau sedang;
- c. 40% - 55% = digolongkan kurang baik;
- d. Kurang dari 40% = digolongkan tidak baik.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kota Sabang

4.1.1 Aspek Geografi

1) Luas dan batas wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Sabang adalah 12.213,97 Ha, yang meliputi Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo, yang terletak pada garis $05^{\circ}46'28''$ LU– $05^{\circ}54'28''$ LU dan $95^{\circ}13'02''$ BT – $95^{\circ}22'36''$ BT dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Andaman
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Andaman
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka

Secara administratif, Kota Sabang terdiri dari 2 (dua) kecamatan dan 18 (delapan belas) *gampong* yang masing-masing kecamatan memiliki luas sebagai berikut: (1) Kecamatan Sukakarya 6.131,85 Ha (50,20%); dan (2) Kecamatan Sukajaya 6.082,12 Ha (49,80%)

2) Topografi

Secara umum Kota Sabang berada pada ketinggian ± 28 m di atas permukaan air laut (dpl). Kondisi morfologinya didominasi oleh pergunungan, yakni sekitar 48,17 % dari luas kawasan keseluruhan. Sedangkan secara lebih rinci topografi Kota Sabang meliputi dataran 1,01%, Landai 6,03%, bergelombang 31,70 %, bergunung 48,17%, sangat curam

14,10%

3) Geologi

Kondisi geologi Kota Sabang secara umum terbagi menjadi 2 (dua) sub bagian dimana diantara 2 sub bagian tersebut kondisinya sangat berbeda, dan pada umumnya terbentuk dari hasil letusan gunung berapi yang terdiri dari tufa andesit. Formasi batuan terdiri dari batuan vulkanis seluas 97,71% dari luas wilayah dan endapan alluvial 0,86%

4) Hidrologi

Sumber daya air di Kota Sabang terdiri dari air permukaan, air tanah dan mata air. Sungai-sungai yang terdapat di Pulau Weh umumnya memiliki ukuran relatif kecil dan pendek. Meskipun Kota Sabang memiliki beberapa sumber air bersih, namun debitnya yang relatif kecil dan topografi pulau Weh yang bergelombang menyebabkan tidak semua wilayah di Kota Sabang mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM Tirta Aneuk Laot.

5) Klimatologi

Secara umum iklim di Kota Sabang termasuk ke dalam iklim tropis. Hal ini dipengaruhi karena letaknya yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Curah hujan tahunan Kota Sabang berjumlah di atas 2000 mm, dengan tingkat curah hujan sedikit terjadi perbedaan antara wilayah pantai dengan wilayah berbukit dan bergunung. Berdasarkan Klasifikasi *Schmidt* dan *Fergusson*, tipe curah hujan Kota Sabang termasuk kelas B (basah). Temperatur rata-rata di Kota Sabang adalah sekitar 26°C

6) Penggunaan Lahan

Kota Sabang berdasarkan hasil pengolahan data pada Peta Pemanfaatan Ruang Atlas Pesisir, dominan penggunaan lahannya adalah kawasan lindung, hal ini didukung oleh bentuk topografi Kota Sabang yang dominan berbukit-bukit dengan tutupan

vegetasinya adalah jenis hutan hujan tropis. Hampir 65% penggunaan lahan di Kota Sabang tergolong dalam kawasan Lindung dengan tutupan yang paling dominan adalah Kawasan Hutan Lindung Seluas 2.493,34 Ha dan yang paling kecil adalah Kawasan Penghijauan seluas 227,26 Ha. Hanya 35% dari luas daratan Kota Sabang penggunaan lahannya tergolong kedalam kawasan budidaya, dengan tutupan dominan adalah kawasan pertanian dan perkebunan, sedangkan untuk kawasan perikanan budi daya darat seluas 10,48 Ha

7) Potensi Wilayah

Bervariasinya kondisi topografi menjadikan Kota Sabang memiliki panorama alam yang sangat indah. Wilayahnya memiliki alokasi pemetaan kegiatan yang sangat bervariasi sehingga cocok untuk pengembangan agrowisata, pertanian, perikanan, industri, maritim dan pariwisata. Dari keenam sektor tersebut, hanya sektor pariwisata sudah mulai berkembang secara signifikan dan berdayahasil yang menonjol dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor ini kedepannya sangat menjanjikan, dengan target pasar utamanya adalah turis nasional dan internasional. Dalam tata ruang Kota Sabang, Pemerintah Kota Sabang menuangkan arahan kebijakan pengembangan wilayahnya kedalam bentuk rencana pemanfaatan ruang, dimana baru 35% ruang untuk kawasan pariwisata dan 73% hutan wisata telah dimanfaatkan. Masih banyak kemungkinan potensi sektor pariwisata yang dapat dikembangkan kedepannya, karena masih tersedia peruntukan lahan sebesar 65% untuk pariwisata. Ditinjau dari distribusi peruntukan lahan yang dituangkan dalam tata Ruang Kota Sabang, arahan pengembangan lahannya lebih dominan diperuntukan untuk kawasan pertanian dan perkebunan serta kawasan perkotaan dan rencana kota baru, dengan tingkat pemanfaatannya untuk kawasan pertanian dan perkebunan telah mencapai 100%, sedangkan kawasan kota dan kota baru masih dibawah 10%, hal ini mengindikasikan potensi pengembangan yang masih terbuka lebar di Kota Sabang dalam bidang

Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Sabang dalam selama kurun waktu tahun 2010 s.d 2014 yang ditunjukkan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami kemajuan, hal ini menunjukkan kinerja semakin membaik dengan ditandai meningkatnya nilai PDRB setiap tahunnya, baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010. Tahun 2010 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sabang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 sebesar Rp.745.858,8 juta meningkat menjadi Rp.874.583,3 juta pada tahun 2014, atau meningkat sebesar 17,26 persen.

Jika dilihat dari setiap sektor, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sabang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha tahun 2010, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011-2013, sedangkan pada tahun 2014 sektor penyedia akomodasi dan makan minum merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,73 persen. Pada Tahun 2014 nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2014 terbesar berasal dari sektor konstruksi yaitu sebesar 28,8 persen (Tabel 1.2). Hal ini dipicu oleh kemajuan pembangunan infrastruktur dalam rangka persiapan pelabuhan bebas sabang, di ikuti oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki yang memiliki kontribusi sebesar 16,6 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki kontribusi sebesar yaitu sebesar 14,9 persen (perdagangan besar dan eceran bukan sepeda motor atau mobil 13,17 persen dan sisanya disumbang oleh perdagangan besar dan reparasi Mobil dan sepeda motor sebesar 1,71 persen)

b. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB Perkapita ADHB Kota Sabang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,48 juta rupiah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2011, PDRB Perkapita naik menjadi 25,65 Juta Rupiah; tahun 2012 naik menjadi 26,94 juta rupiah; tahun 2013 menjadi 38,59 juta rupiah hingga tahun 2014 meningkat menjadi 30,06 juta rupiah. Berdasarkan nilai diatas, dapat dijelaskan bahwa setiap satu orang penduduk Kota Sabang dapat menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar 30,06 juta pada tahun 2014. Peningkatan yang terjadi setiap tahun menjelaskan bahwa adanya peningkatan PDRB.

c. Laju Inflasi Kota Sabang

Inflasi merupakan perubahan tingkat harga (barang dan jasa) umum yang terjadi secara terus menerus. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan ekonomi sangat tidak menguntungkan. Inflasi berdampak secara umum pada kegiatan ekonomi negara yang lebih lanjut berdampak pada pengangguran. Selain itu juga menimbulkan efek-efek kepada individu masyarakat diantaranya adalah menurunkan pendapatan riil masyarakat berpendapatan tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk pembagian kekayaan. Di Kota Sabang, inflasi dapat dihitung menggunakan proxy indeks implisit dari PDRB harga berlaku dan harga konstan dikarenakan tidak tersedianya data Indeks Harga Konsumen. Indeks implisit merupakan rasio perbandingan antara PDRB ADHB dengan PDRB Karena digunakan sebagai tahun dasar baru, indeks implisit PDRB tahun 2010 bernilai 100. Ini menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHB sama dengan nilai PDRB ADHK di tahun 2010. Indeks implisit ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun searah dengan kenaikan harga. Dengan menggunakan tahun dasar 2010,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

indeks implisit PDRB di tahun 2011 naik menjadi 103,72. Kemudian pada tahun 2012 menjadi 106,24 hingga mencapai 112,53 pada tahun 2014. Indeks ini menggambarkan besarnya kenaikan harga yang terjadi pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun dasar 2010. Yang berarti, pada tahun 2014 terjadi kenaikan harga sebesar 12,53 persen dari harga-harga pada tahun 2010.

Tingkat Kemiskinan

Pengukuran derajat kesejahteraan rakyat dilihat dari tingkat kemiskinan mencakup jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) dan aspek Garis Kemiskinan (ketimpangan pendapatan) Kota Sabang bergerak lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya anggaran belanja Kota Sabang. Artinya dalam lima tahun terakhir pembangunan Kota Sabang belum mendorong perubahan signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Tabel berikut menunjukkan fakta bahwa kesenjangan sosial yang terjadi disebabkan karena ketimpangan pendapatan rakyat semakin dalam.

Sumber: BPS 2015.

Pada tahun 2014 garis kemiskinan berada pada Rp. 457.242 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 451.218. Hal ini menunjukkan bahwa selama Tahun 2014 penduduk Kota Sabang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya membutuhkan biaya Rp. 457.242 selama sebulan. Untuk indeks kedalaman kemiskinan (p1) Kota Sabang pada tahun 2014 mencapai 3,96 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 4,06. Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata

lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sementara angka keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2014 menunjukkan angka 1,23 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan *untuk mengetahui intensitas kemiskinan*. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

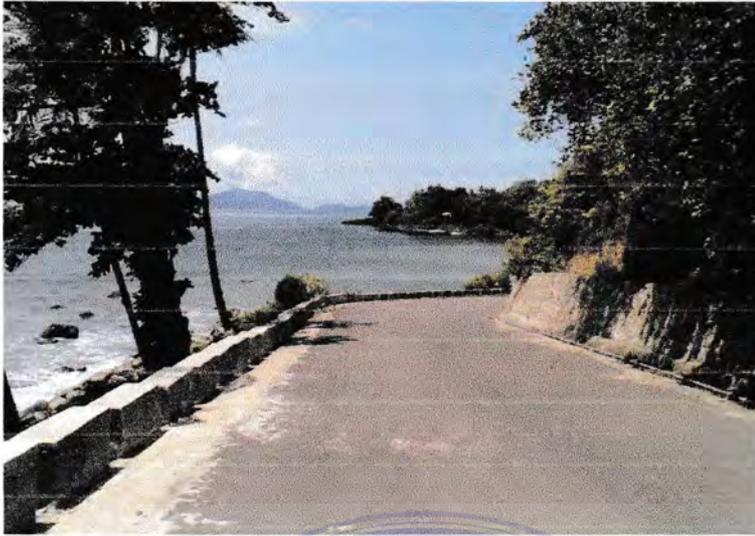
e. Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM Kota Sabang hanya mengalami sedikit peningkatan dari 77,23 pada tahun 2013 menjadi 77,53 pada tahun 2014. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami mengingat dampak dari lambatnya peningkatan investasi disektor kesehatan dan pendidikan.

4.2. Profil Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang

Letak Geografis

UPTD Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang terletak di Bango, Jalan Pasir Putih – Lhueng Angen No.10 Gampong Paya Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Lokasi UPTD BLK Maritim Kota Sabang terletak 26 km dari pusat kota yang dapat ditempuh sekitar 25 menit dengan kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4. Kondisi jalan menuju UPTD BLK Maritim Kota Sabang sudah cukup bagus.



Kondisi jalan menuju UPTD BLK Maritim Kota Sabang



Peta UPTD BLK Maritim Kota Sabang diambil dari Google Earth

Program Pelatihan

UPTD Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang melaksanakan beberapa program pelatihan yang disesuaikan dengan sumber dana dan jenis pelatihan yang dialokasikan :

1. Program Pelatihan Berbasis Masyarakat

Program pelatihan berbasis masyarakat adalah program pelatihan yang materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan jumlah jam pelajaran yang bervariasi. Pelatihan jenis ini biasanya bersumber anggaran dari APBK Sabang dan APB Provinsi Aceh. Kurikulum pelatihannya tidak mengacu kepada SKKNI

2. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi

Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) adalah program pelatihan yang memungkinkan setiap peserta mengikuti pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang ingin diikutinya. Kurikulum pelatihan ini mengacu kepada SKKNI. Pelatihan jenis ini biasanya bersumber anggaran dari APBN baik melalui dana Tugas Pembantuan atau Dekosenterasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Program Pelatihan Swadana

Program pelatihan swadana adalah program pelatihan yang dananya bersumber dari pihak ketiga, baik perorangan maupun perusahaan yang ingin meningkatkan kapasitas kemampuan pekerjaanya. Untuk saat ini program pelatihan swadana belum berjalan.

Gedung dan Fasilitas

Untuk menunjang agar program pelatihan dapat berjalan sesuai dengan baik, UPTD BLK Maritim Kota Sabang dilengkapi dengan sarana dan prasarana :

Bangunan Gedung Kantor :

1. Gedung Kantor Administrasi
2. Ruang Teori
3. Workshop Otomotif
4. Workshop Teknologi Mekanik
5. Workshop Konstruksi Kapal Kayu/Fiber

6. Ruang Genset

7. Pos Jaga
8. Mushalla
9. Asrama Siswa
10. Ruang Makan/Dapur
11. Bak Penampungan Air

Area Pertapakan

Luas area lahan : ± 7 Hektar

SUMBER TENAGA

Sumber listrik PLN

Sumber Genset

Peralatan

Tersedia beragam peralatan yang menunjang pelatihan yang sudah lengkap antara lain :

Peralatan Pelatihan Menjahit

Peralatan Pelatihan Komputer

Peralatan Pelatihan Listrik Penerangan

Peralatan Pelatihan Sepeda Motor

Peralatan Pelatihan Otomotif

Peralatan Pelatihan Las Listrik

Peralatan Pelatihan Bubut

Peralatan Pelatihan Konstruksi

Jurusan Pelatihan

UPTD Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang terdiri dari beberapa jurusan dan sub jurusan yang dapat dirincikan sebagai berikut :

- A. Jurusan Automotive

- a. Mobil Bensin
 - b. Mobil Diesel
 - c. Sepeda Motor
- B. Jurusan Teknologi Mekanik
- a. Bubut Dasar
 - b. Las Listrik
 - c. Las Otogen / Karbit
 - d. Instalasi Pemipaan
- C. Jurusan Listrik dan Elektronika
- a. Instalasi Penerangan
 - b. AC/Teknik Pendingin
 - c. Elektronika
 - d. Handphone (HP)
- D. Jurusan Konstruksi Kapal Kayu/ Fiber
- a. Pembuatan Kapal Kayu
 - b. Pembuatan Kapal Fiber
 - c. Fiber Glass Dasar
- E. Aneka Kejuruan
- a. Menjahit
 - b. Bordir
 - c. Kriya
- F. Teknologi Informatika
- a. Operator Komputer
 - b. Teknisi Komputer
 - c. Autocad

G. Jurusan Bangunan

- a. Meubel / Perabot
- b. Bangunan Batu
- c. Konstruksi Kayu

Sumber Daya Manusia

Guna mendukung kelancaran program kegiatan pada UPTD Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang, maka dibentuk susunan struktur organisasi UPTD BLK Maritim Kota Sabang yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tenaga Struktural

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Sabang maka dapat dirincikan sebagai berikut :

Kepala UPTD	: 1	Orang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	: 1	Orang
Petugas Operasional Program dan Evaluasi	: 1	Orang
Petugas Operasional Pemasaran dan Pelatihan	: 1	Orang
Petugas Operasional Sarana dan Prasarana	: 1	Orang
Petugas Operasional Keamanan dan Ketertiban	: 1	Orang

Tenaga Instruktur

Tenaga instruktur yang telah mengikuti Diklat Dasar Instruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang berlokasi di beberapa Balai Besar seperti Bekasi, Bandung, Surakarta dan Serang. Daftar instruktur aktif per jurusan dapat dirinci sebagai berikut :

Instruktur Jurusan Automotive	: 3	Orang
Instruktur Jurusan Teknologi Mekanik	: 2	Orang
Instruktur Jurusan Listrik dan Elektronika	: 2	Orang
Instruktur Jurusan Konstruksi Kapal Fiber	: 1	Orang
Instruktur Jurusan Aneka Kejuruan	: 1	Orang
Instruktur Jurusan Teknologi Informatika	: 2	Orang
Instruktur Jurusan Bangunan	: 3	Orang

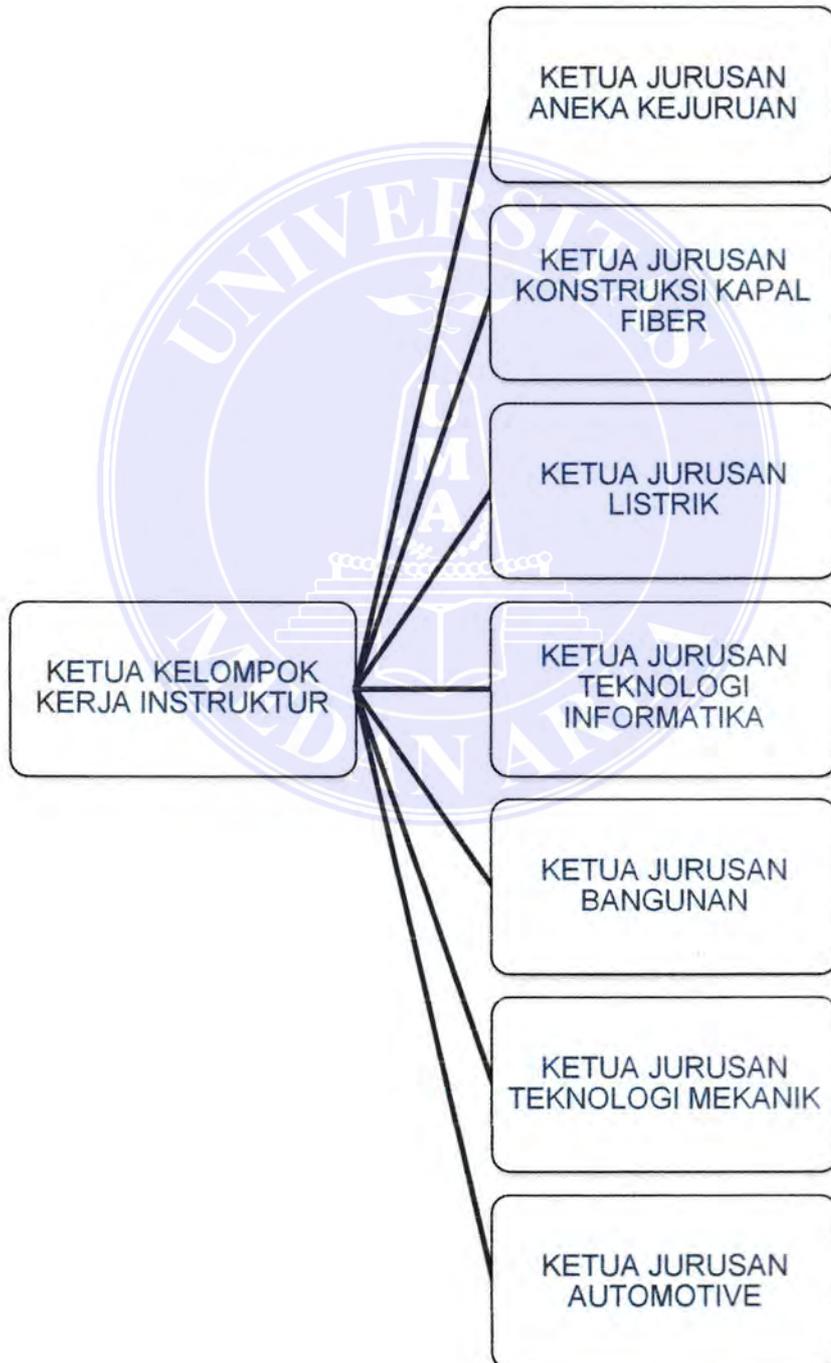


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
BALAI LATIHAN KERJA (BLK) MARITIM
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KOTA SABANG
(PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 12 TAHUN 2009)



STRUKTUR KELOMPOK KERJA INSTRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

BALAI LATIHAN KERJA (BLK) MARITIM



Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tahun 2017

Pada tahun 2017, UPTD Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang telah melaksanakan beberapa program pelatihan baik pelatihan berbasis masyarakat maupun pelatihan berbasis kompetensi dengan sumber dana APBK Sabang serta APBN yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tahun 2017

Kejuruan Sepeda Motor	: 1 Paket
Kejuruan Las Listrik	: 1 Paket
Kejuruan Perkayuan	: 1 Paket
Kejuruan Operator Komputer	: 1 Paket
Kejuruan Menjahit	: 1 Paket

Pengembangan Program

Perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan dunia usaha menuntut balai latihan kerja menyesuaikan diri agar mampu meningkatkan mutu lulusan pelatihan sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Untuk itu diperlukan beragam terobosan baru dan pengembangan yang dilaksanakan UPTD Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang di masa yang akan datang.

Beberapa program pengembangan yang akan dikembangkan di UPTD Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang dapat dirincikan sebagai berikut :

- Meningkatkan sarana prasarana pelatihan yang standart melalui upaya peremajaan peralatan yang ada serta penyediaan peralatan untuk beberapa kejuruan yang belum lengkap.

- Meningkatkan manajemen pelatihan menuju BLK yang bertaraf Nasional dengan peningkatan kemampuan pengelolaan pelatihan baik melalui diklat maupun bimtek yang dilaksanakan oleh instansi terkait
- Meningkatkan Sumber Daya Pelatihan yang kompeten terutama peningkatan kapasitas dan kemampuan instruktur.
- Meningkatkan hubungan Kerja dengan pasar kerja agar lulusan pelatihan dapat sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Mitra Kerja

Kemampuan peserta pelatihan perlu terus dibina dan diasah agar mampu memenuhi standar kompetensi yang ingin dicapai. Salah satu cara mengasah kemampuan peserta adalah dengan memperbanyak jam latihan baik latihan di dalam lingkungan BLK maupun diluar lingkungan BLK yang lebih dikenal dengan sebutan pemagangan.

Beberapa mitra kerja yang selama ini terus menjalin kerjasama dengan UPTD BLK Maritim Kota Sabang :

1. UPTP BLKI Banda Aceh
2. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
3. LPKS yang ada di Kota Sabang

Tugas, Fungsi dan wewenang UPTD BLK Maritim Kota Sabang

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas

Penduduk Kota Sabang, UPTD BLK Maritim Kota Sabang bertugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Sabang dibidang Pelatihan Tenaga Kerja.

Dalam hal menyelenggarakan tugas di bidang Pelatihan Tenaga Kerja, UPTD BLK Maritim Kota Sabang memiliki fungsi antara lain :

- a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD BLK Maritim Kota Sabang.
- b. Melaksanakan urusan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat.
- c. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD BLK Maritim Kota Sabang.
- d. Melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban serta pengamanan asset UPTD BLK Maritim Kota Sabang.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, UPTD BLK Maritim Kota Sabang memiliki kewenangan antara lain :

- a. Pengawasan, pengoperasian penyelenggaraan UPTD BLK Maritim Kota Sabang
- b. Pelaksanaan urusan pelaksanaan pelatihan.
- c. Pelaksanaan urusan pemasaran.
- d. Penyiapan bahan-bahan untuk kebutuhan pelatihan di UPTD BLK Maritim Kota Sabang.
- e. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana UPTD BLK Maritim Kota Sabang serta sarana lainnya.

Visi, Misi dan Sasaran UPTD BLK Maritim Kota Sabang

UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim Kota Sabang dalam perannya dalam proses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merumuskan visi, misi dan sasaran yang ingin dicapai. Perumusan visi, misi dan sasaran ini diharapkan memberikan dan mengarahkan program kerja yang akan disusun agar dapat lebih berdayaguna, efisien dan efektif.

Visi :

Menciptakan Sumber Daya Manusia yang trampil, mandiri, dan profesional untuk membuka lapangan kerja baru.

Misi :

1. Melatih pemuda/i putus sekolah dan pengangguran dengan berbagai ketrampilan sesuai bakat dan keahlian.
2. Menciptakan calon tenaga kerja baru yang trampil dan profesional diberbagai disiplin ilmu.
3. Memberikan materi praktek teknis dibidang masing-masing disiplin ilmu.
4. Menciptakan tenaga kerja kemaritiman sesuai kebutuhan kelautan dan perikanan.
5. Menciptakan calon tenaga kerja yang trampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dalam maupun ke luar negeri.
6. Melakukan pemagangan ke industri-industri dan lembaga-lembaga terkait. Menjalinkan kerja sama dengan pihak Luar Negeri, Departemen-departemen, Non- Departemen, Universitas, Sekolah, Swasta, Industri dll.

Sasaran :

1. Membekali tenaga kerja yang terampil dan kompeten
2. Terwujudnya jejaring kerja dengan pengguna tenaga kerja
3. Tersedianya program pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja
4. Memfasilitasi pembinaan pelatihan bagi masyarakat yang membutuhkan
5. Tersedianya sistem informasi pelatihan kerja yang relevan dan akurat
6. Mengembangkan Jasa Produksi dan konsultasi pelatihan
7. Menyiapkan menjadi BLK Internasional



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang evaluasi pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi (PPBK) di kota Sabang tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) PPBK Tahun Anggaran 2017 di kota Sabang dilaksanakan dengan cukup efektif sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai efektivitas (*effectiveness*) sebesar 75,00 persen yang berarti berada dalam kategori cukup baik atau sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PPBK yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu hasil pelatihan PPBK dirasakan mampu memberi kemudahan akses terhadap masyarakat miskin. Selanjutnya PPBK dirasakan efektif karena pengelolaannya dilaksanakan oleh BLK Maritim dengan partisipasi yang aktif dari masyarakat.
- 2) Sumber daya yang digunakan dalam PPBK di kota Sabang cukup efisien dan telah mampu mencapai hasil yang cukup optimal. Kegiatan PPBK telah selesai dilaksanakan, pelaksanaannya telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya. Terkait dengan kriteria efisiensi (*efficiency*) PPBK di kota Sabang , hasil penelitian menunjukkan nilai 75,06 persen, yang berarti berada dalam kategori cukup baik.

- 3) Yang sangat menonjol dari aspek kecukupan (*adequacy*) dalam pemenuhan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi adalah pelatihan PPBK yang dibuat. Hal ini berdampak pada manfaat hasil pembangunan pelatihan yang benar-benar dapat diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Hasil penelitian untuk aspek kecukupan (*adequacy*) PPBK di kota Sabang menunjukkan nilai 54,58 persen, dan berarti berada dalam kategori kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwasanya pelatihan yang di buat dikota sabang masih sangat kurang di bandingkan dengan masyarakat yang membutuhkan pelatihan tersebut,terutama pemuda/pemudi putus sekolah yang sangat mengharapkan adanya program PPBK.
- 4) Sasaran PPBK berorientasi pada kesamaan (*equity*) antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Secara umum pada aspek kesamaan ini sebagian besar responden menyatakan bahwa masyarakat selalu dilibatkan secara partisipatif dalam program PPBK, mulai dari proses persiapan dan perencanaan. Persentase warga masyarakat yang ikut ambil bagian cukup maksimal, bahkan dalam tahapan pengawasan partisipasi warga masyarakat termasuk dalam cukup baik yang berakibat pada baiknya kualitas pelatihan yang dibuat di BLK Maritim Kota Sabang. Demikian pula dari hasil penelitian, hasil kegiatan PPBK dirasakan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. Pada kriteria kesamaan, hasil penelitian menunjukkan nilai 74,84 persen, yang berarti bahwa tingkat kesamaan (*equity*) dalam pengelolaan PPBK di kota Sabang berada dalam kategori cukup baik atau sedang.

- 5) Hasil PPBK di kota Sabang cukup dapat memuaskan dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Secara umum masyarakat mengapresiasi PPBK yang telah dilaksanakan di dua Kecamatan di Kota Sabang, Hal ini disebabkan oleh pelatihan yang dibuat adalah kejuruan dasar yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dan mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama.

Pada aspek responsivitas (*responsiveness*) terlihat jelas bahwa sebagian besar masyarakat menunjukkan kepeduliannya dengan mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan PPBK. Hal ini menunjukkan bahwa PPBK memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat karena merasa diperhatikan dan diuntungkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah terkait PPBK ini. Hasil penelitian menunjukkan nilai 70,81 persen, yang berarti bahwa responsivitas (*responsiveness*) PPBK di kota Sabang berada dalam kategori cukup baik atau sedang.

- 6) Pelaksanaan PPBK di kota Sabang sudah tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang signifikan pada kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa kegiatan PPBK ini ditetapkan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian Tenaga Kerja dan menurut penelitian yang dilakukan bahwa BLK Maritim memang sudah tepat dan layak mengelola PPBK. Ketepatan sasaran dapat dilihat dari sisi kemendesakan kebutuhan pelatihan, penerima manfaat yang mayoritas adalah warga yang membutuhkan pelatihan dan diproyeksikan dapat memberikan kemudahan akses dalam rangka

memulihkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan nilai 70,81 persen, yang berarti bahwa kriteria ketepatan (*appropriateness*) berada dalam kategori yang cukup baik atau sedang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) Tahun Anggaran 2017 di kota Sabang sesuai dengan indikator yang ditetapkan termasuk dalam kategori cukup baik dengan rata-rata skor 70,65 persen.

6.2. Saran

Untuk lebih mengoptimalkan tingkat keberhasilan dalam pengelolaan program pelatihan yang dilaksanakan dengan dikelola oleh BLK Maritim dan guna mengatasi berbagai hambatan yang dijumpai di lapangan, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Untuk mencapai tingkat efektivitas (*effectiveness*) yang maksimal seperti pada program PPBK di kota Sabang , masyarakat serta pelaku lainnya wajib memahami substansi program secara utuh karena akan sangat membantu keberhasilan tujuan program. Pemahaman substansi dapat diperoleh dari sosialisasi dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas yang diberikan oleh Instruktur. Pada tataran pemangku kebijakan pemahaman substansi program secara utuh akan sangat berpengaruh dalam mendorong komitmen dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelatihan.

- 2) Untuk mewujudkan persentase efisiensi (*efficiency*) yang maksimal pada PPBK di kota Sabang diperlukan komitmen yang kuat dari pengelola program dalam melaksanakan kegiatan. Komitmen tersebut dapat berupa :
 - a. kesepakatan bersama untuk melaksanakan program sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Rencana kerja yang telah disusun dan disepakati harus benar-benar dilaksanakan;
 - c. Asas transparansi dan akuntabilitas harus dijalankan dalam mengelola program;
 - d. Dalam kegiatan PPBK dan Rencana Anggaran Biaya harus dibuat dengan rincian yang sebaik-baiknya dan dilaksanakan dilapangan dengan benar, baik itu penggunaan tenaga Instruktur, biaya transport untuk siswa dan yang lainnya.
- 3) Untuk mewujudkan persentase kriteria kecukupan (*adequacy*) yang maksimal pada PPBK di kota Sabang para pengambil kebijakan harus memiliki data yang akurat sebelum mengambil keputusan. Data yang harus valid tersebut minimal :
 - a. Data kebutuhan aktual masyarakat;
 - b. Jumlah warga yang membutuhkan pelatihan.
- 4) Dalam meningkatkan persentase kriteria kesamaan (*equity*) pada suatu program pelatihan masyarakat seperti PPBK di kota Sabang, panitia pelaksana kegiatan hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain :

- a. Pastikan masyarakat ikut serta yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola program;
 - b. Pastikan bahwa hasil pelatihan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat, terutama warga yang membutuhkan;
 - c. Pastikan warga masyarakat mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan PPBK yang telah dibuat.
- 5) Dalam upaya meningkatkan responsivitas (*responsiveness*) program dimasyarakat para pengambil kebijakan hendaknya memiliki data-data yang valid sebelum mengeluarkan keputusan kebijakan. Karena responsivitas sebuah program masih dinilai gagal apabila belum menanggapi kebutuhan aktual dari masyarakat yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Data-data tersebut minimal sebaran KK miskin, kebutuhan prioritas masyarakat yang bersifat urgent, potensi sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan kebijakan.
- 6) Untuk meningkatkan ketepatan sasaran (*appropriateness*) dalam program PPBK atau program pelatihan masyarakat yang sejenisnya diharapkan kepada panitia pelaksana kegiatan untuk memastikan beberapa hal penting, antara lain :
- a. Pastikan masyarakat telah siap melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut;
 - b. Penerima manfaat program mayoritas adalah warga miskin (pemuda/pemudi putus sekolah);
 - c. Kegiatan yang dibuat merupakan kebutuhan prioritas masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh mayoritas warga di wilayah tersebut;

- d. Review Perencanaan benar-benar dilaksanakan secara partisipatif di masyarakat dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dibangun adalah kebutuhan prioritas masyarakat, atau walaupun kegiatan itu bukan kebutuhan prioritas tetapi setidaknya dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian;
- e. Pastikan kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan pola partisipatif dari masyarakat;
- f. Pastikan pelatihan yang dibuat dapat dilaksanakan setiap tahunnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, 2006, ***Kebijakan Publik***, Jakarta: Suara Bebas
- Agustino, Leo. 2006, ***Politik & Kebijakan Publik***, Bandung: AIPI Bandung
- Agustino, Leo. 2006, ***Dasar-Dasar Kebijakan Publik***, Bandung: CV Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi, 1996, ***Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek***, Jakarta : Rineka Cipta,
- Arikunto, Suharsimi, 2006, ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek***, Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, ***Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*** (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta,
- Badan Pusat Statistik, 2017, ***Statistik Pembangunan Kota Sabang Tahun 2017***.
- Bryan & White, 1987, ***Manajemen Pembangunan Untuk Pembangunan Negara Berkembang***, alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang, Jakarta, LP3ES
- Chris I Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Departement of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State-Nigeria, April 2012, ***Public Policy and Challenges of Policy Evaluation in Third World***, “British Journal of Humaniora and Social Science”
- Dr. Glenn Laverack, TDR, WHO Geneva, SEWA, ASHA, 26-30 Oktober 2009, ***Community and Empowerment***, “Dokumen Kerja untuk Konferensi Global ke-7 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi kesehatan Asia Tenggara”.
- Dunn, William N., 2003, ***Analisis Kebijakan Publik***, terjemah ***Public Policy Analysis; an Introduction***, Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama
- Hadari Nawawi, 2001, ***Manajemen Sumber Daya Manusia***, Yogyakarta; GMU Press.
- Hadari Nawawi, 1991, ***Metode Pelatihan bidang Sosial***, Yogyakarta, GMU Press.
- Marielle Berriet-Slliec, Pierre Labarthe, Catherine Laurent and Jacques Baudry, 17-18 February 2011, ***Empirical Validity of The Evaluation and Quality of Evidence***. “International Journal of Sains and Research”.
- Muhammad Rusli dan Hamsinah, Maret 2014, ***Policy Evaluation Study on Subsidy Policy, Qualitative basis, for Poverty Alleviation in Pare-pare, South Sulawesi***, “International Journal of Sains and Research”.
- Nazarudin, Rian, 2018, ***Analisis Peran Pelatihan Kerja Oleh Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Potensi Angkatan Kerja di Bandar***

Lampung di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nazir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta; Graha Indonesia.

Nonformalwulan.blogspot.com, *Sejarah Balai Latihan Kerja di Indonesia*.

Nugroho D Riant, 2011, *Public policy : Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Manajemen Dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Elex Media Computindo.

Nugroho D Riant, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Banyu Media.

Nurwino, 2015, *Evaluasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Tahun Anggaran 2013 di Kota Medan*.

Pemerintah kota Sabang, 2015 *Lakip Kota Sabang*.

Pemerintah kota Sabang, 2015, *Profil Kota Sabang*, website Resmi Pemerintah Kota Sabang.

Pemerintah kota Sabang, 2014, *Profil BLK Maritim Kota Sabang*

Pemerintah Kota Sabang, 2017, *Laporan Pelatihan Berbasis Kompetensi*, BLK Maritim Kota Sabang

Poerwandani, 2007, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia-Jakarta, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi.

Putra, 2003, *Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dalam Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Pustaka Belajar.

Republik Indonesia, 2006, *Peraturan Pemerintah No. 39 Tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*, Jakarta.

Republik Indonesia, 2000, *Undang-Undang No. 25 Tentang Program Pembangunan Nasional*, Jakarta.

Republik Indonesia, 2013, *Undang-Undang No. 15 Tentang Perubahan atas undang-Undang No. 19 Tahun 2012 Tentang APBN Tahun 2013*, Jakarta.

Remi dan Tjiptoherijanto, 2003, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta; Elex media Computindo.

Soetanah B, Ramessur S dan Rojid S, 2009, *Does Infrastructure Alleviaties Poverty in Develoving Countries?*, "International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies".

Sugiyono, 1998, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung; Alfabeta.

- Sugiyono, 2006, *Metode penelitian Bisnis*, Bandung; Alfaberta.
- Suharno, 2008, *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta; UNY Press.
- Suharno, 2010, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta; UNY Press.
- Sulchan, Mohammad, 2007, *Manajemen Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Semarang*, UNNES
- Surachmad, Winarno, 1990, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Jakarta; Erlangga.
- Sutrisno, 1995, *Organisasi Sektor Publik*, Yogyakarta; Pustaka Utama.
- Wibawa dkk, 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta; Erlangga.
- Winarno, Budi, 2007, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Media Press.
- Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta; Media Press.
- Woleong, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV.Remaja Rosdakarya.



Lampiran 1

4060.063.005	BLK SABANG			315.280.000
073	Mekanik Junior Sepeda Motor			65.770.000
A	TAHAP PERSIAPAN			300.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			300.000
	- Makan Rapat Biasa [5 ORG x 1 KL x 1 PKT]	10 OK	30.000	300.000
B	TAHAP PELAKSANAAN			65.220.000
521211	Belanja Bahan			1.800.000
	- ATK	1 PKT	500.000	500.000
	- Komputer Supplies	1 PKT	500.000	500.000
	- ATK Peserta [16 ORG x 1 PKT]	16 OP	50.000	800.000
521213	Honor Output Kegiatan			1.200.000
	- Honor Tim Rekrutmen [2 ORG x 1 PKT]	2 ORG	300.000	600.000
	- Honor Pelaksana Kegiatan [2 ORG x 1 PKT]	2 OP	300.000	600.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			46.220.000
	- Snack pembukaan dan penutupan [20 ORG x 1 PKT]	40 OP	13.000	520.000
	- Sertifikat [16 ORG x 1 LBR x 1 PKT]	16 OK	20.000	320.000
	- Konsumsi Peserta Pelatihan 320 JP [16 ORG x 40 HR x 1 PKT]	640 OH	15.000	9.600.000
	- Reproduksi Modul [16 ORG x 1 PKT]	16 ORG	100.000	1.600.000
	- Konsumsi sidang kelulusan [5 ORG x 1 KL x 1 PKT]	5 OP	20.000	100.000
	- Pakaian Kerja [16 ORG x 1 POT x 1 PKT]	16 ORG	150.000	2.400.000
	- Kaos Peserta pelatihan [16 ORG x 1 POT x 1 PKT]	16 OK	80.000	1.280.000
	- Asuransi Peserta [16 ORG x 1 PKT]	16 PKT	25.000	400.000
	- Bahan Pelatihan mekanik junior sepeda motor 320 JP	1 PKT	30.000.000	30.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi			9.600.000
	- Honor Instruktur [1 ORG x 320 JP x 1 PKT]	320 OJ	30.000	9.600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.400.000
	- Transport Peserta [16 ORG x 40 HR x 1 PKT]	640 OT	10.000	6.400.000

C	TAHAP PELAPORAN			250.000
521211	Belanja Bahan			250.000
	- Dokumentasi dan Pelaporan	1 PKT	250.000	250.000
080	Basic Office			40.170.000
A	TAHAP PERSIAPAN			300.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			300.000
	- Makan Rapat Biasa [5 ORG x 2 KL x 1 PKT]	10 OK	30.000	300.000
B	TAHAP PELAKSANAAN			39.620.000
521211	Belanja Bahan			1.800.000
	- ATK	1 PKT	500.000	500.000
	- Komputer Supplies	1 PKT	500.000	500.000
	- ATK Peserta [16 ORG x 1 PKT]	16 OP	50.000	800.000
521213	Honor Output Kegiatan			1.200.000
	- Honor Tim Rekrutmen [2 ORG x 1 PKT]	2 ORG	300.000	600.000
	- Honor Pelaksana Kegiatan [2 ORG x 1 PKT]	2 OP	300.000	600.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			26.620.000
	- Snack pembukaan dan penutupan [20 ORG x 1 PKT]	40 OP	13.000	520.000
	- Sertifikat [16 ORG x 1 LBR x 1 PKT]	16 OK	20.000	320.000
	- Konsumsi Peserta Pelatihan 320 JP [16 ORG x 25 HR x 1 PKT]	400 OH	15.000	6.000.000
	- Reproduksi Modul [16 ORG x 1 PKT]	16 ORG	100.000	1.600.000
	- Konsumsi sidang kelulusan [5 ORG x 1 KL x 1 PKT]	5 OP	20.000	100.000
	- Pakaian Kerja [16 ORG x 1 POT x 1 PKT]	16 ORG	150.000	2.400.000
	- Kaos Peserta pelatihan [16 ORG x 1 POT x 1 PKT]	16 OK	80.000	1.280.000
	- Asuransi Peserta [16 ORG x 1 PKT]	16 PKT	25.000	400.000
	- Bahan Pelatihan Basic Office 200 JP	1 PKT	14.000.000	14.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi			6.000.000
	- Honor Instruktur [1 ORG x 200 JP x 1 PKT]	200 OJ	30.000	6.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4.000.000
	- Transport Peserta [16 ORG x 25 HR x 1 PKT]	400 OT	10.000	4.000.000
C	TAHAP PELAPORAN			250.000
521211	Belanja Bahan			250.000
	- Dokumentasi dan Pelaporan	1 PKT	250.000	250.000
118	Cabinet Making			52.570.000
A	TAHAP PERSIAPAN			300.000

521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			300.000
	- Makan Rapat Biasa [5 ORG x 1 KL x 1 PKT]	10 OK	30.000	300.000
B	TAHAP PELAKSANAAN			52.020.000
521211	Belanja Bahan			1.800.000
	- ATK	1 PKT	500.000	500.000
	- Komputer Supplies	1 PKT	500.000	500.000
	- ATK Peserta [16 ORG x 1 PKT]	16 OP	50.000	800.000
521213	Honor Output Kegiatan			1.200.000
	- Honor Tim Rekrutmen [2 ORG x 1 PKT]	2 ORG	300.000	600.000
	- Honor Pelaksana Kegiatan [2 ORG x 1 PKT]	2 OP	300.000	600.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			35.020.000
	- Snack pembukaan dan penutupan [20 ORG x 1 PKT]	40 OP	13.000	520.000
	- Sertifikat [16 ORG x 1 LBR x 1 PKT]	16 OK	20.000	320.000
	- Konsumsi Peserta Pelatihan 280 JP [16 ORG x 35 HR x 1 PKT]	560 OH	15.000	8.400.000
	- Reproduksi Modul [16 ORG x 1 PKT]	16 ORG	100.000	1.600.000
	- Konsumsi sidang kelulusan [5 ORG x 1 KL x 1 PKT]	5 OP	20.000	100.000
	- Pakaian Kerja [16 ORG x 1 POT x 1 PKT]	16 ORG	150.000	2.400.000
	- Kaos Peserta pelatihan [16 ORG x 1 POT x 1 PKT]	16 OK	80.000	1.280.000
	- Asuransi Peserta [16 ORG x 1 PKT]	16 PKT	25.000	400.000
	- Bahan Pelatihan Cabinet Making 280 JP	1 PKT	20.000.000	20.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi			8.400.000
	- Honor Instruktur [1 ORG x 2800 JP x 1 PKT]	280 OJ	30.000	8.400.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.600.000
	- Transport Peserta [16 ORG x 35 HR x 1 PKT]	560 OT	10.000	5.600.000
C	TAHAP PELAPORAN			250.000
521211	Belanja Bahan			250.000
	- Dokumentasi dan Pelaporan	1 PKT	250.000	250.000
121	Custom Made Pakaian Wanita Anak			50.070.000
A	TAHAP PERSIAPAN			300.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			300.000
	- Makan Rapat Biasa [5 ORG x 1 KL x 1 PKT]	10 OK	30.000	300.000
B	TAHAP PELAKSANAAN			49.520.000
521211	Belanja Bahan			1.800.000
	- ATK	1 PKT	500.000	500.000

	- Komputer Supplies	1 PKT	500.000	500.000
	- ATK Peserta [16 ORG x 1 PKT]	16 OP	50.000	800.000
521213	Honor Output Kegiatan			1.200.000
	- Honor Tim Rekrutmen [2 ORG x 1 PKT]	2 ORG	300.000	600.000
	- Honor Pelaksana Kegiatan [2 ORG x 1 PKT]	2 OP	300.000	600.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			32.520.000
	- Snack pembukaan dan penutupan [20 ORG x 1 PKT]	40 OP	13.000	520.000
	- Sertifikat [16 ORG x 1 LBR x 1 PKT]	16 OK	20.000	320.000
	- Konsumsi Peserta Pelatihan 280 JP [16 ORG x 35 HR x 1 PKT]	560 OH	15.000	8.400.000
	- Reproduksi Modul [16 ORG x 1 PKT]	16 ORG	100.000	1.600.000
	- Konsumsi sidang kelulusan [5 ORG x 1 KL x 1 PKT]	5 OP	20.000	100.000
	- Pakaian Kerja [16 ORG x 1 POT x 1 PKT]	16 ORG	150.000	2.400.000
	- Kaos Peserta pelatihan [16 ORG x 1 POT x 1 PKT]	16 OK	80.000	1.280.000
	- Asuransi Peserta [16 ORG x 1 PKT]	16 PKT	25.000	400.000
	- Bahan Pelatihan Custome Made Pakaian Wanita Anak 280 JP	1 PKT	17.500.000	17.500.000
522151	Belanja Jasa Profesi			8.400.000
	- Honor Instruktur [1 ORG x 2800 JP x 1 PKT]	280 OJ	30.000	8.400.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.600.000
	- Transport Peserta [16 ORG x 35 HR x 1 PKT]	560 OT	10.000	5.600.000
C	TAHAP PELAPORAN			250.000
521211	Belanja Bahan			250.000
	- Dokumentasi dan Pelaporan	1 PKT	250.000	250.000
128	Juru Las SMAW 3G			74.970.000
A	TAHAP PERSIAPAN			300.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			300.000
	- Makan Rapat Biasa [5 ORG x 1 KL x 1 PKT]	10 OK	30.000	300.000
B	TAHAP PELAKSANAAN			74.420.000
521211	Belanja Bahan			1.800.000
	- ATK	1 PKT	500.000	500.000
	- Komputer Supplies	1 PKT	500.000	500.000
	- ATK Peserta [16 ORG x 1 PKT]	16 OP	50.000	800.000
521213	Honor Output Kegiatan			1.200.000
	- Honor Tim Rekrutmen [2 ORG x 1 PKT]	2 ORG	300.000	600.000
	- Honor Pelaksana Kegiatan [2 ORG x 1 PKT]	2 OP	300.000	600.000

521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			53.420.000
	- Snack pembukaan dan penutupan [20 ORG x 1 PKT]	40 OP	13.000	520.000
	- Sertifikat [16 ORG x 1 LBR x 1 PKT]	16 OK	20.000	320.000
	- Konsumsi Peserta Pelatihan 3600 JP [16 ORG x 45 HR x 1 PKT]	720 OH	15.000	10.800.000
	- Reproduksi Modul [16 ORG x 1 PKT]	16 ORG	100.000	1.600.000
	- Konsumsi sidang kelulusan [5 ORG x 1 KL x 1 PKT]	5 OP	20.000	100.000
	- Pakaian Kerja [16 ORG x 1 POT x 1 PKT]	16 ORG	150.000	2.400.000
	- Kaos Peserta pelatihan [16 ORG x 1 POT x 1 PKT]	16 OK	80.000	1.280.000
	- Asuransi Peserta [16 ORG x 1 PKT]	16 PKT	25.000	400.000
	- Bahan Pelatihan Juru Las SMAW 3G 360 JP	1 PKT	36.000.000	36.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi			10.800.000
	- Honor Instruktur [1 ORG x 360 JP x 1 PKT]	360 OJ	30.000	10.800.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			7.200.000
	- Transport Peserta [16 ORG x 45 HR x 1 PKT]	720 OT	10.000	7.200.000
C	TAHAP PELAPORAN			250.000
521211	Belanja Bahan			250.000
	- Dokumentasi dan Pelaporan	1 PKT	250.000	250.000
146	Administrasi Kegiatan di BLK			31.730.000
W	ADMINISTRASI KEGIATAN PELATIHAN DI UPTD BLK			31.730.000
521115	Honor Operasional Satuan Kerja			10.520.000
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 6 BLN]	6 OB	600.000	3.600.000
	- Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu [1 ORG x 6 BLN]	6 OB	450.000	2.700.000
	- Honor Staff Pengelola [1 ORG x 6 BLN]	6 OB	370.000	2.220.000
	- Honor Panitia Pengadaan Barang [1 ORG x 2 PKT]	2 OP	600.000	1.200.000
	- Honor Panitia Penerima Hasil Kerja [1 ORG x 2 PKT]	2 OP	400.000	800.000
521211	Belanja Bahan			6.000.000
	- Penggandaan Laporan	6 BLN	500.000	3.000.000
	- ATK	6 OK	500.000	3.000.000
524111	Belanja perjalanan biasa			15.210.000
	- Transport Operasional Dalam Rangka Koordinasi ke BLK Banda A	6 OT	350.000	2.100.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) I	1 OT	4.000.000	4.000.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI. Jakarta) [1 OT x 3 I	3 OH	530.000	1.590.000
	- Uang Penginapan Jakarta [1 ORG x 2 HR x 1 TRIP]	2 OH	550.000	1.100.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Aceh) [1 ORG x 2 HR x	12 OT	360.000	4.320.000



Lampiran 2 : Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN **EVALUASI PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENS(PPBK)** **TAHUN ANGGARAN 2017 DI KOTA SABANG**

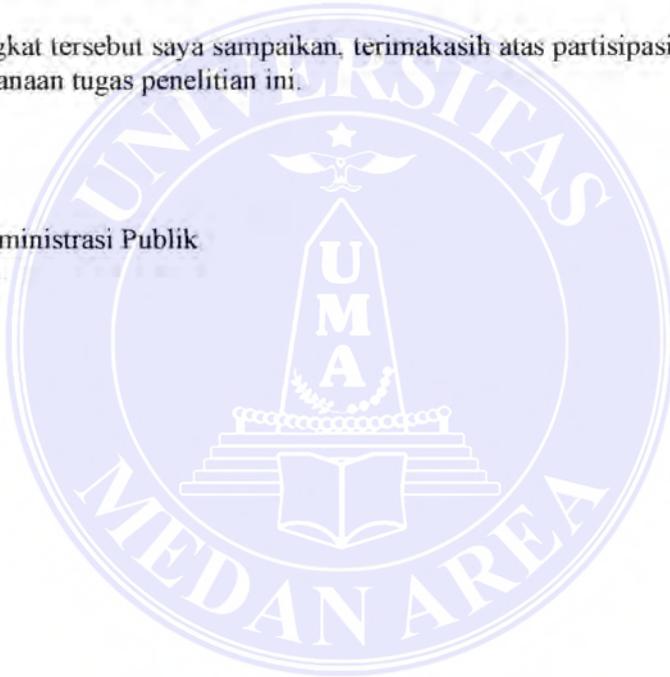
Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara menjadi peserta survey dan secara sukarela mengisi kuesioner ini. Nama saya Romy Hidayat, mahasiswa magister administrasi publik Universitas Medan Area, saat ini sedang mengadakan penelitian tentang evaluasi Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) tahun anggaran 2017 di Kota Sabang. Kami sangat menghargai kejujuran Bapak/Ibu/Saudara dalam mengisi kuesioner ini. Kami menjamin kerahasiaan Bapak/Ibu/Saudara yang terkait dengan kuesioner. Hasil survey ini semata-mata akan digunakan untuk tujuan penelitian dan bukan untuk tujuan komersil.

Demikian gambaran singkat tersebut saya sampaikan, terimakasih atas partisipasi dan dukungan dalam membantu pelaksanaan tugas penelitian ini.

Hormat saya,

Romy Hidayat

Mahasiswa Magister Administrasi Publik
Universitas Medan Area



No :

KUESIONER

Petunjuk: Berikan tanda conteng (\surd) pada pilihan jawaban yang anda pilih

Nama : (jika bersedia)

Alamat :
..... Telp.

Pekerjaan : Golongan (khusus PNS) :

Jabatan :

Screening

Apakah anda mengetahui Program PPBK? () Ya () Tidak

Data Umum Responden

Jenis Kelamin () Laki-laki () Perempuan
Usia () < 30 tahun () 30-40 tahun () 40-50 tahun () > 50 tahun
Pendidikan () SD () SLTP () SLTA () Diploma
() S1 () \geq S2

Profil Pemahaman Terhadap Program PPBK

1. Dari mana anda pertama kali mengetahui tentang PPBK?

() media massa () lingkungan Rt/Rw
() tempat pelatihan/Dinas terkait () fasilitator

2. Hal apa yang pertama kali anda ketahui terkait PPBK?

() program pemerintah () penanggulangan pengangguran
() pelatihan tenaga kerja () program pendukung PSDM/PKK

Tingkat Kecenderungan/Variabel Penelitian

Petunjuk: Berikan nilai pada setiap pertanyaan atau pernyataan yang ada dengan penjelasan sebagai berikut:

a = sangat baik

b = baik

c = biasa saja

d = kurang baik

Variabel Penelitian

A. Efektivitas

1. Apakah anda mengetahui secara jelas tentang Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) di Kota Sabang?
 - (a) Sangat Mengetahui
 - (b) Mengetahui
 - (c) Kurang Mengetahui
 - (d) Tidak Mengetahui
2. Apakah anda mengetahui secara jelas tujuan/sasaran Program PPBK di Kota Sabang?
 - (a) Sangat Mengetahui
 - (b) Mengetahui
 - (c) Kurang Mengetahui
 - (d) Tidak Mengetahui
3. Apakah anda mengetahui secara jelas tentang tata cara pelaksanaan Program PPBK di Kota Sabang?
 - (a) Sangat Mengetahui
 - (b) Mengetahui
 - (c) Kurang Mengetahui
 - (d) Tidak Mengetahui
4. Apakah anda dapat memahami peraturan tersebut?
 - (a) Sangat Memahami
 - (b) Memahami
 - (c) Kurang Memahami
 - (d) Tidak Memahami
5. Apakah anda mengetahui secara jelas bahwa program PPBK dilaksanakan sesuai dengan tahapannya?
 - (a) Sangat Mengetahui
 - (b) Mengetahui
 - (c) Kurang Mengetahui
 - (d) Tidak Mengetahui
6. Menurut anda, apakah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
 - (a) Sangat Sesuai
 - (b) Sesuai
 - (c) Kurang Sesuai
 - (d) Tidak Sesuai

7. Apakah anda mendapatkan sosialisasi dan peningkatan kapasitas yang memadai terkait Program PPBK?
 - (a) Sangat Memadai
 - (b) Memadai
 - (c) Kurang Memadai
 - (d) Tidak Memadai
8. Apakah anda mengetahui tentang penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan Program PPBK di BLK?
 - (a) Sangat Mengetahui
 - (b) Mengetahui
 - (c) Kurang Mengetahui
 - (d) Tidak Mengetahui
9. Menurut anda, apakah rencana kerja tersebut telah disusun dengan baik?
 - (a) Sangat Baik
 - (b) Baik
 - (c) Kurang Baik
 - (d) Tidak Baik
10. Apakah anda mengetahui tentang kelengkapan sarana dan prasarana kerja dalam pelaksanaan PPBK di BLK?
 - (a) Sangat Mengetahui
 - (b) Mengetahui
 - (c) Kurang Mengetahui
 - (d) Tidak Mengetahui
11. Menurut anda, apakah sarana dan prasarana kerja tersebut sudah memadai?
 - (a) Sangat Memadai
 - (b) Memadai
 - (c) Kurang Memadai
 - (d) Tidak Memadai
12. Menurut anda, apakah kemampuan kelompok setiap kejuruan yang melaksanakan kegiatan PPBK sudah memadai?
 - (a) Sangat Memadai
 - (b) Memadai
 - (c) Kurang Memadai
 - (d) Tidak Memadai
13. Menurut anda, Intensitas pelatihan yang dilaksanakan secara formal oleh BLK yang di bantu oleh Instruktur?
 - (a) Sangat Sering
 - (b) Cukup Sering
 - (c) Jarang Terjadi
 - (d) Tidak Pernah

14. Menurut anda, apakah pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan PPBK di BLK dilakukan secara intensif dan rutin?
- (a) Sangat Intensif dan Rutin
 - (b) Cukup Intensif dan Rutin
 - (c) Kurang Intensif dan Rutin
 - (d) Tidak Intensif dan Rutin

B. Efisiensi

15. Apakah anda mengetahui Rencana Anggaran Biaya dalam pelaksanaan PPBK di BLK(biaya untuk siswa)?
- (a) Sangat Mengetahui
 - (b) Mengetahui
 - (c) Kurang Mengetahui
 - (d) Tidak Mengetahui
16. Menurut anda, apakah Tenaga Instruktur yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan PPBK di BLK sesuai dengan kejuruan yang ada?
- (a) Sangat Sesuai
 - (b) Sesuai
 - (c) Kurang Sesuai
 - (d) Tidak Sesuai
17. Menurut anda, apakah biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan PPBK di BLK sesuai dengan volume dan jenis kegiatan yang dibuat?
- (a) Sangat Sesuai
 - (b) Sesuai
 - (c) Kurang Sesuai
 - (d) Tidak Sesuai
18. Menurut anda, apakah pelaksanaan kegiatan pelatihan di BLK sesuai dengan waktu yang rencanakan?
- (a) Sangat Sesuai
 - (b) Sesuai
 - (c) Kurang Sesuai
 - (d) Tidak Sesuai
19. Apakah peran panitia pelatihan berpengaruh dalam pelaksanaan Program PPBK di BLK?
- (a) Sangat Berpengaruh
 - (b) Berpengaruh
 - (c) Kurang Berpengaruh
 - (d) Tidak Berpengaruh

C. Kecukupan

20. Apakah sudah sesuai, kejuruan dasar yang dibuat dengan prioritas kebutuhan industri yang ada?
- (a) Sangat sesuai
 - (b) Sesuai
 - (c) Kurang Sesuai
 - (d) Tidak Sesuai
21. Apakah hasil pelatihan kejuruan dasar dalam PPBK di BLK bermanfaat bagi masyarakat?
- (a) Sangat Bermanfaat
 - (b) Bermanfaat
 - (c) Kurang Bermanfaat
 - (d) Tidak Bermanfaat
22. Apakah kegiatan pelatihan yang dibuat sudah mencukupi kebutuhan yang diharapkan masyarakat?
- (a) Sangat Mencukupi
 - (b) Mencukupi
 - (c) Kurang Mencukupi
 - (d) Tidak Mencukupi

D. Kesamaan (Keadilan)

23. Apakah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan dalam pelatihan di BLK selalu melibatkan warga masyarakat?
- (a) Sangat Sering
 - (b) Sering
 - (c) Jarang
 - (d) Tidak Pernah
24. Menurut anda, apakah hasil kegiatan pelatihan tersebut bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat?
- (a) Sangat Bermanfaat
 - (b) Bermanfaat
 - (c) Kurang Bermanfaat
 - (d) Tidak Bermanfaat
25. Menurut anda, apakah warga masyarakat merasa puas dengan hasil pelatihan yang telah dibuat?
- (a) Sangat Merasa puas
 - (b) Merasa puas
 - (c) Kurang Merasa puas
 - (d) Tidak Merasa puas
26. Apakah kegiatan pelatihan dilaksanakan secara intensif oleh BLK?
- (a) Sangat intensif
 - (b) Intensif

- (c) Kurang Intensif
- (d) Tidak Intensif

E. Responsivitas

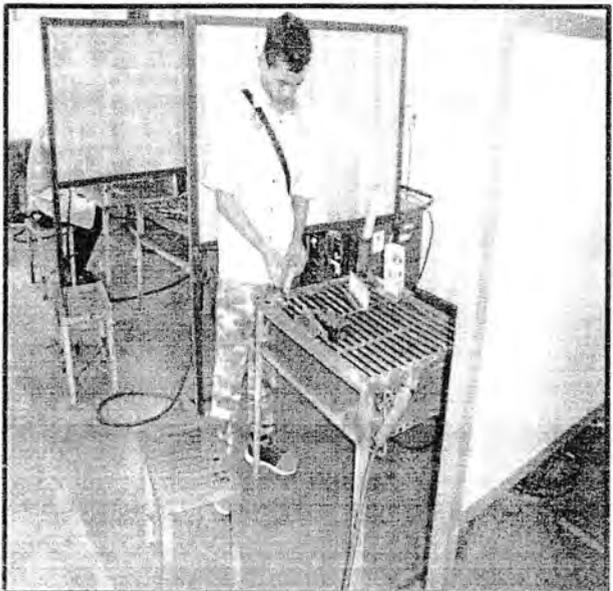
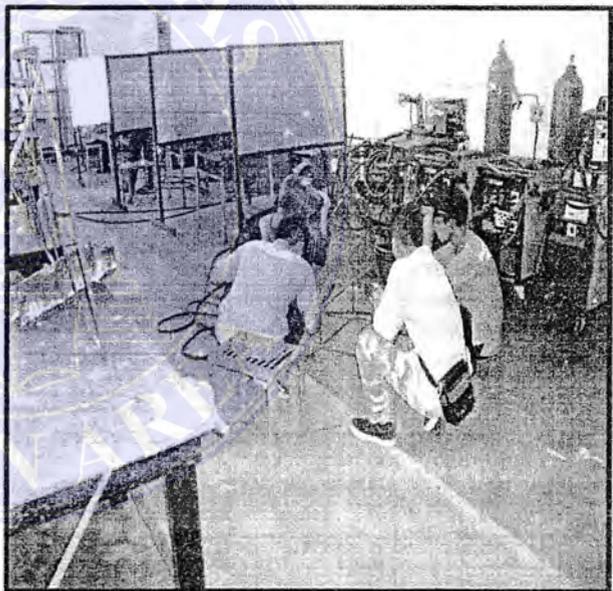
27. Menurut anda, apakah warga masyarakat mendukung pelaksanaan program PPBK di tempat anda?
- (a) Sangat Mendukung
 - (b) Mendukung
 - (c) Kurang Mendukung
 - (d) Tidak Mendukung
28. Menurut anda, apakah warga masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan PPBK di tempat anda?
- (a) Sangat Partisipatif
 - (b) Partisipatif
 - (c) Kurang Partisipatif
 - (d) Tidak Partisipatif
29. Menurut anda, bagaimana dukungan warga masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PPBK?
- (a) Sangat Baik
 - (b) Baik
 - (c) Kurang Baik
 - (d) Tidak Baik
30. Menurut anda, apakah hasil pelaksanaan kegiatan PPBK memuaskan warga masyarakat di tempat anda?
- (a) Sangat Memuaskan
 - (b) Memuaskan
 - (c) Kurang Memuaskan
 - (d) Tidak Memuaskan
31. Menurut anda, bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap Program PPBK di tempat anda?
- (a) Sangat Positif
 - (b) Positif
 - (c) Kurang Positif
 - (d) Tidak Positif

F. Ketepatan

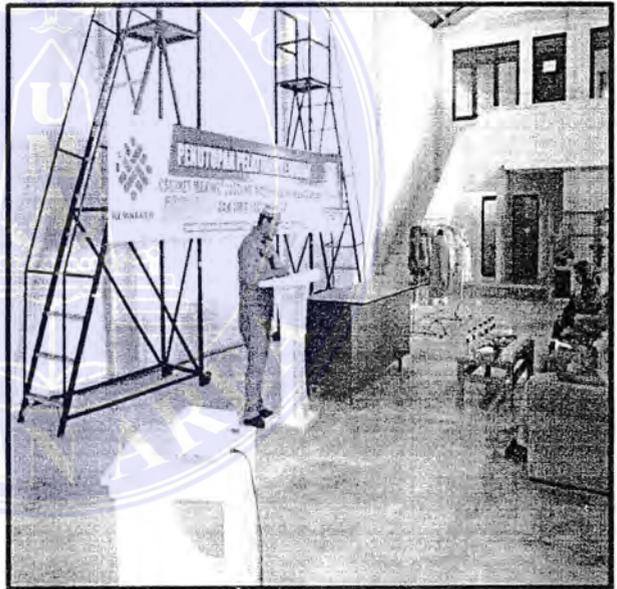
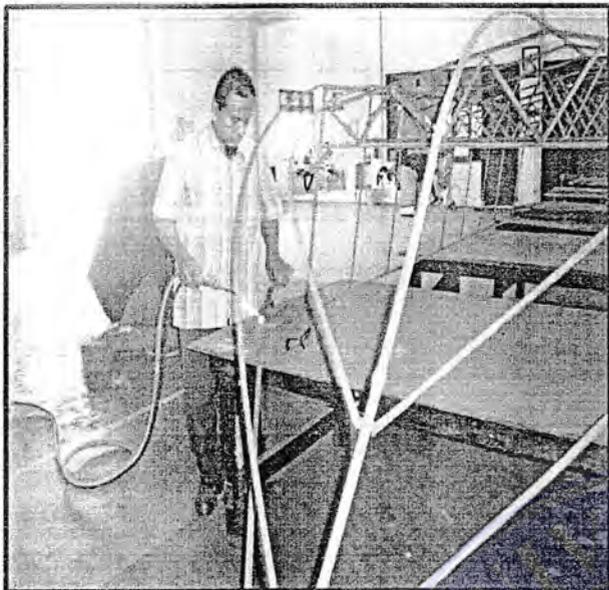
32. Menurut anda, apakah layak BLK untuk mengelola program PPBK di Kota Sabang?
- (a) Sangat Layak
 - (b) Layak
 - (c) Kurang Layak
 - (d) Tidak Layak

33. Menurut anda, apakah efektif pengelolaan program PPBK dilaksanakan oleh BLK?
- (a) Sangat Efektif
 - (b) Efektif
 - (c) Kurang Efektif
 - (d) Tidak Efektif
34. Menurut anda, apakah berhasil program PPBK dalam memberikan kemudahan akses pekerjaan?
- (a) Sangat Berhasil
 - (b) Berhasil
 - (c) Kurang Berhasil
 - (d) Tidak Berhasil
35. Menurut anda, apakah hasil pelatihan pada program PPBK berpengaruh dalam memulihkan kembali kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat?
- (a) Sangat Berpengaruh
 - (b) Berpengaruh
 - (c) Kurang Berpengaruh
 - (d) Tidak Berpengaruh
36. Menurut anda, apakah sudah ada kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan masyarakat ?
- (a) Sangat Sesuai
 - (b) Sesuai
 - (c) Kurang Sesuai
 - (d) Tidak Sesuai
37. Menurut anda, apakah tetap bermanfaat hasil pelatihan pada program PPBK di BLK yang diadakan setiap tahun?
- (a) Sangat Bermanfaat
 - (b) Bermanfaat
 - (c) Kurang Bermanfaat
 - (d) Tidak Bermanfaat

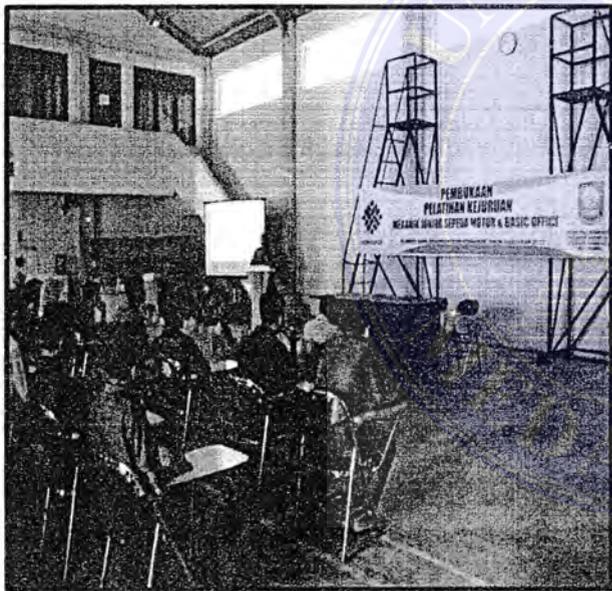
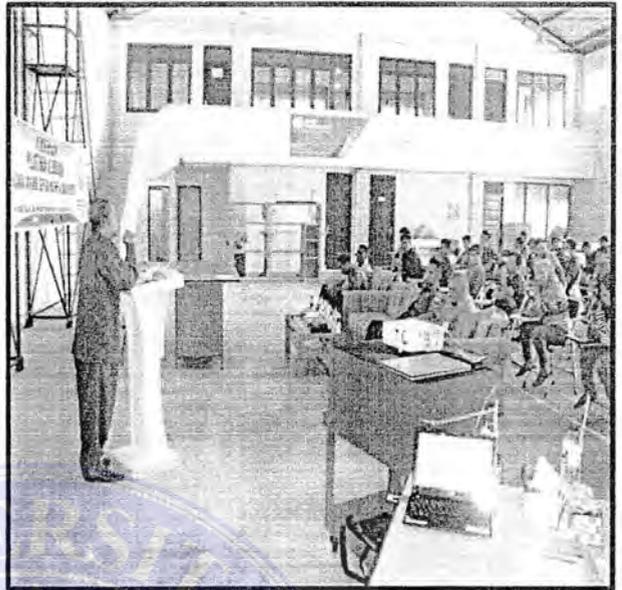
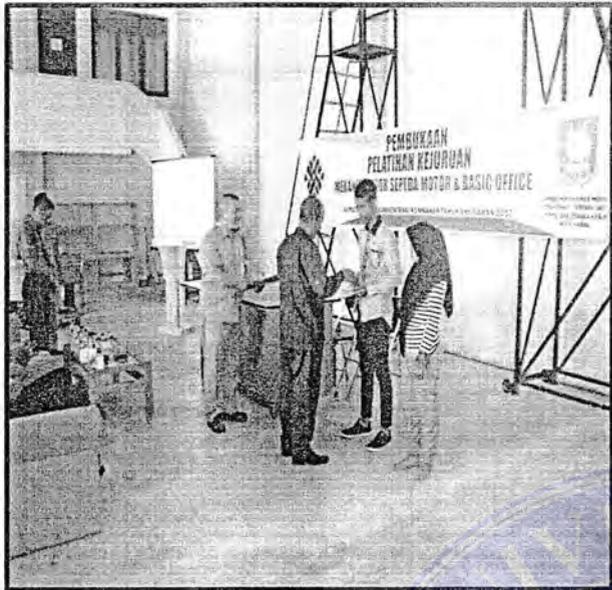
PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN



PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN



PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN



PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN

